

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PANDEMI
COVID-19 SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA
PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN
2019-2020**

Skripsi

**Untuk memenuhi Sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

Muhammad Luthfi Haryamto

NIM: 31401506044

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2021**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PANDEMI
COVID-19 SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA
PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN
2019-2020**

Skripsi

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

Muhammad Luthfi Haryamto

NIM: 31401506044

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2021**

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA
MODAL DENGAN PANDEMI COVID-19 SEBAGAI VARIABEL
MODERASI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN
2019-2020**

Disusun oleh:

Muhammad Luthfi Haryanto

NIM: 31401506044

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi

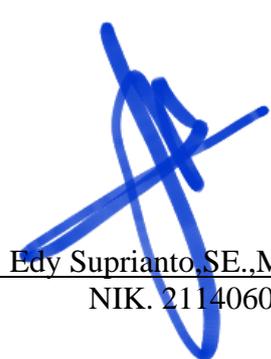
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

Semarang, 22 Juli 2021

Pembimbing,


Dr. Edy Suprianto, SE., M.Si., Ak., CA
NIK. 211406018

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA
MODAL DENGAN PANDEMI COVID-19 SEBAGAI VARIABEL
MODERASI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN
2019-2020**

Disusun oleh:

Muhammad Luthfi Haryamto

NIM: 31401506044

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 30 Juli 2021

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing


Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Ak., C.A
NIK. 211406018

Penguji 1


Rustam Hanafi, S.E., MSc., Ak., C.A
NIK. 211403011

Digitally signed
- by Rustam Hanafi
Date: 2021.08.05
14:31:07 +07'00'

Penguji 2


Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ASEAN CPA., CRP
NIK. 211492003

Digitally signed by Sri Dewi
Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ACPACC., CRP.
DN: cn=Sri Dewi
Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ACPACC., CRP., o=Unissula,
ou=Fakultas Ekonomi, email=sridewi@unissula.ac.id, c=ID
Date: 2021.08.04 15:45:48 +07'00'

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Tanggal 30 Juli 2021

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si., Akt., C.A
NIK. 211415029

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Luthfi Haryamto

NIM : 31401506044

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian untuk Skripsi dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PANDEMI COVID-19 SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019-2020”** benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Juli 2021
Yang membuat pernyataan

Muhammad Luthfi Haryamto
NIM. 31401506044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, maka apabila kamu telah salasai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“Percayalah pada dirimu sendiri dan ketahuilah bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang lebih besar daripada rintangan apapun”

(Christian D. Larson)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

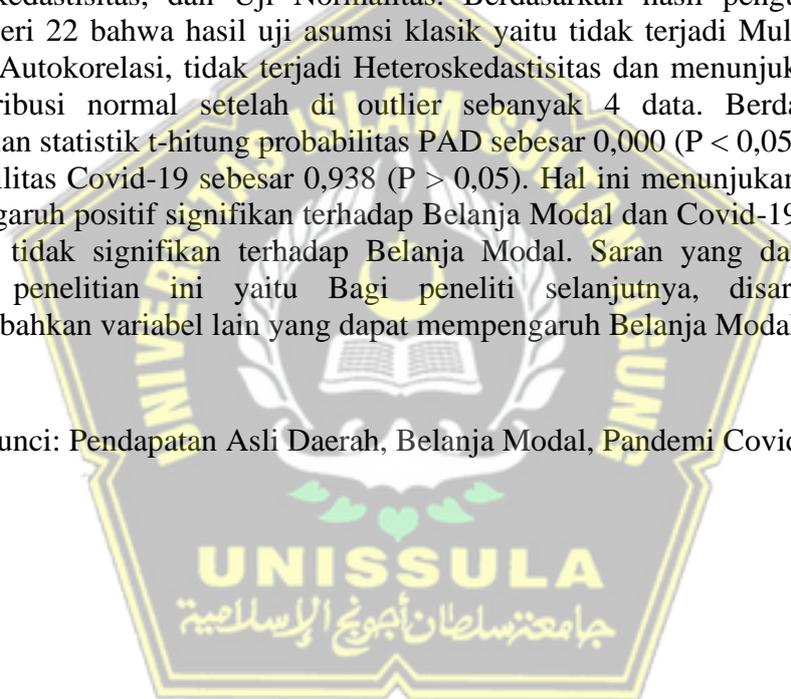
1. Allah SWT, karna atas Ridha-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Joko dan Ibu Rochayu yang telah mendoakan, membimbing, memotivasi, mendukung dengan bentuk spiritual maupun material, dan meyakinkanku bahwa saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semua teman seperjuangan.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dengan pemoderasi Covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah 136 seluruh pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2019-2020. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode *Moderated Regression Analysis*. Semua data yang diolah menggunakan Uji Asumsi Klasik yaitu Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Normalitas. Berdasarkan hasil pengujian statistik SPSS seri 22 bahwa hasil uji asumsi klasik yaitu tidak terjadi Multikolinearitas, terjadi Autokorelasi, tidak terjadi Heteroskedastisitas dan menunjukkan data yang berdistribusi normal setelah di outlier sebanyak 4 data. Berdasarkan hasil pengujian statistik t-hitung probabilitas PAD sebesar 0,000 ($P < 0,05$) dan t-hitung probabilitas Covid-19 sebesar 0,938 ($P > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dan Covid-19 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pandemi Covid-19



INTISARI

Pemerintah provinsi mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset. Namun pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang terjadi pada seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hal ini menjadikan pendapatan asli daerah sebagai dana bantuan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap belanja modal dan Covid-19 dapat memoderasi diantara dua variabel tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2019-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan teknik *purposive sampling method*, dimana sampel yang akan diteliti ditentukan dengan suatu kriteria. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2019-2020. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah *agency theory* adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*.

Hasil penelitian terdahulu tentang faktor yang mempengaruhi belanja modal telah banyak dilakukan. Penelitian Paramartha & Budiasih (2016); Pradana & Handayani (2017); dan Aqnisa (2016) yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini juga sama terjadi pada penelitian yang dilakukannya oleh Juniawan & Suryantini (2018) dan Azhar (2018) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan Dwianto (2016) dan Karwur, Ventje, dan Jessy (2018) yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Sama dengan penelitian yang terjadi pada Prasetya (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap belanja modal.

Teknik analisis menggunakan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan Uji R^2 , Uji t, dan Uji f. Semua data yang diolah menggunakan Uji Asumsi Klasik yaitu Uji Multikolinearitas, Uji Autokolerasi, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Normalitas. Berdasarkan hasil pengujian statistik spss seri 22 bahwa hasil uji asumsi klasik yaitu tidak terjadi Multikolinearitas, terjadi autokolerasi, tidak terjadi Heterokedastisitas, dan menunjukkan data yang berdistribusi normal setelah dilakukan dengan cara menghilangkan data ekstrim. Berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pandemi Covid-19 sebagai pemoderasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada hubungan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dengan Pandemi Covid-19 Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020” Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari segala kendala dan kesulitan bila tanpa bimbingan, dorongan, saran dan kritik dan bantuan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menyusun Skripsi ini, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.d selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si., Akt., C.A selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Ak., C.A selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan sangat sabar untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan, pengarahan, saran dan kritik yang sangat berguna bagi penulis.

4. Kedua orang tua saya atas curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang tiada henti dan sangat besar yang tidak ternilai harganya bagi penulis.
5. Diri saya sendiri yang begitu luar biasa mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk selalu menjadi bagian yang paling kuat dan dapat mempercayai diri sendiri, hingga diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.
6. Teman-teman dan semua sahabat-sahabat saya tika, vivi, nurul, nindita, nazhira, manggala, megananda, icha, dan galuh yang senantiasa mendoakan, mendukung dan memotivasi.
7. Semua pihak lain yang telah membantu penyelesaian skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan serta kritik yang membangun agar usulan penelitian ini dapat lebih sempurna.

Semarang, 22 Juli 2021

Penulis,

Muhammad Luthfi Haryamto
NIM: 31401506044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
INTISARI.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Teoritis dan Praktis	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 <i>Grand Theory</i>	9
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	9
2.2 Variabel Penelitian	12
2.2.1 Belanja Modal	12
2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	14

2.3 Penelitian Terdahulu.....	18
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	23
2.4.1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal	23
2.4.2 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal dengan Pandemi Covid-19 sebagai Pemoderasi	24
2.5 Kerangka Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Populasi dan Sampel	28
3.3 Sumber dan Jenis Data	29
3.4 Metode Pengumpulan Data	30
3.5 Variabel dan Indikator.....	30
3.5.1 Variabel Penelitian	30
3.5.2 Definisi Operasional Variabel.....	31
3.5.2.1 Pendapatan Asli Daerah	33
3.5.2.2 Belanja Modal	33
3.5.2.3 Pandemi Covid -19.....	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	34
3.6.2 Metode Analisis Regresi Moderasi	34
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	35
3.6.3.1 Uji Multikolinieraritas	35
3.6.3.2 Uji Autokorelasi	37
3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas	38
3.6.3.4 Uji Normalitas	39

3.6.4 Uji Hipotesis.....	40
3.6.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)	40
3.6.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	41
3.6.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T).....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.1.2 Deskriptif Variabel.....	44
4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	45
4.1.3.1 Hasil Uji Normalitas.....	46
4.1.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas	50
4.1.3.3 Hasil Uji Autokorlasi.....	51
4.1.3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	52
4.1.4 Hasil Uji Hipotesis	54
4.1.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	55
4.1.4.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	56
4.1.4.3 Hasil Uji Regresi	57
4.1.4.4 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)	58
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.....	58
4.2.2 Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal dengan Pandemi Covid-19 sebagai pemoderasi	59
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Implikasi	63

5.3 Keterbatasan Penelitian	63
5.4 Saaran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Ringkasan Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	31
Tabel 3. 2 Pengambilan Keputusan ada dan tidaknya Autokorelasi	38
Tabel 4. 1 Distribusi Sampel	43
Tabel 4. 2 Analisis Statistik Deskriptif	44
Tabel 4. 3 Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S)	48
Tabel 4. 4 Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) setelah Ln	50
Tabel 4. 5 Uji Multikolinearitas dengan Nilai Tolerance dan VIF	51
Tabel 4. 6 Uji Autokorelasi	52
Tabel 4. 7 Hasil Uji Glejser setelah Ln	54
Tabel 4. 8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	55
Tabel 4. 9 Uji Signifikansi Simultan (Uji f)	56
Tabel 4. 10 Hasil Uji Regresi	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	26
Gambar 4. 1 Grafik normal P-Plot	47
Gambar 4. 2 Grafik normal P-Plot setelah Ln.....	49
Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot setelah Ln.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekap Data APBD Per Semester Tahun 2019-2020 Seluruh Provinsi di Indonesia	69
Lampiran 2 Tabel Statistik Deskriptif	74
Lampiran 3 Tabel Uji Multikolinearitas dengan Nilai Tolerance dan VIF	75
Lampiran 4 Tabel Uji Autokorelasi	76
Lampiran 5 Gambar Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot	77
Lampiran 6 Gambar Grafik normal P-P Plot	78
Lampiran 7 Tabel Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S)	79
Lampiran 8 Tabel Uji R ²	80
Lampiran 9 Tabel Uji F	81
Lampiran 10 Tabel Uji T dan Regresi Moderasi	82
Lampiran 11 Tabel Statistik Deskriptif setelah Ln	83
Lampiran 12 Tabel Uji Multikolinearitas dengan Nilai Tolerance dan VIF setelah Ln	84
Lampiran 13 Tabel Uji Autokorelasi Setelah Ln	85
Lampiran 14 Gambar Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot Setelah Ln	86
Lampiran 15 Gambar Grafik normal P-P Plot Setelah Ln	87
Lampiran 16 Tabel Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) Setelah Ln	88
Lampiran 17 Tabel Uji R ² Setelah Ln	89
Lampiran 18 Tabel Uji F Setelah Ln	90
Lampiran 19 Tabel Uji T dan Regresi Moderasi	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya tiap daerah yang ada pada Negara Indonesia ini sudah begitu besar dan juga pesat, hal ini sejalan dengan adanya desentralisasi fiskal dan juga kebijakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah ini memprioritaskan kemampuan dan juga peranan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah serta pembangunan yang diupayakan untuk menjadi lebih baik. Pemerintah daerah perlu melaksanakan pengubahan susun belanja daerah, yang mulanya banyak dianggarkan demi kepentingan belanja rutin yang tidak begitu produktif, dengan melaksanakan alokasi belanja yang merujuk pendanaan untuk penyelenggaraan layanan umum pada masyarakat untuk beberapa sektor yang lainnya. Melalui peningkatan belanja daerah ini, dengan demikian diperlukan besaran dana yang tidak sedikit agar belanja daerah ini bisa tercukupi dan terwadahi (Fatimah, Anita dan Danang, 2019).

Dana pengalokasian pada belanja modal dipengaruhi dengan besaran penerimaan daerah yang berkaitan itu sendiri. Pihak pemerintah daerah mampu menaikkan penerimaan daerahnya tersebut dengan cara mengelola sumber daya daerah yang tersedia tersebut, yang mana bahwa ini kemudiakan akan masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang di masa depan digunakan sebagai satu dari beberapa sumber pendanaan belanja modal yang ada. Lebih

mendalam bahwa penerimaan daerah juga bersumberkan dari dana perimbangan, tidak sebataskan pada PAD. Apabila penerimaan PAD masih belum memenuhi belanja modal, maka pihak pemerintah daerah tersebut berharap bahwa dana transfer yang disediakan pihak pemerintah pusat itu dimaksudkan agar menutup alokasi dana belanja modal untuk tiap tahunnya tersebut. Untuk keadaan ini, dana perimbangan yang berperan sebagai penerimaan daerah ini kemudian dikirimkan pihak pemerintah pusat ini biasanya diperjadikan sebagai sumber pembiayaan untuk keperluan semua aktivitas pemerintah daerah itu sendiri.

Dikutip dari Tribun Jogja (2017), pada tahun 2017 serapan anggaran di Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan juga Kabupaten Magelang ini dianggap tidak begitu tinggi. Sampai di bulan Desember 2017 pertengahan, penyerapan anggaran pada tiga daerah ini hanya berada pada titik 54 persen. Hal tersebut diakibatkan belanja modal yang masih rendah. Penyebab lain rendahnya capaian penyerapan yaitu terlambatnya penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM). Dikutip dari Tribun Solo (2018), pada tahun 2018 serapan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ada pada Kota Solo ini masih dianggap tidak tinggi. Tercatat serapan APBD Kota Solo baru mencapai 47 persen. Terdapat aktivitas organisasi dan juga perangkat daerah yang sudah berlangsung, akan tetapi anggaran ini masih belum dapat dilaksanakan pencairan. Artinya, angka serapan ini disebabkan bahwa pencairan yang dilaksanakan tersebut waktunya di akhir. Namun pada tahun 2020, terjadi Pandemi Covid-19 yang membuat APBD pemerintah daerah di Indonesia perlu direvisi. Dikutip dari Berita Satu (2020), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Medan mengalami pengurangan hingga 40 persen pada tahun 2020 akibat dari Pandemi Covid-19. Anggaran yang berkurang tersebut meliputi DAK, DAU, DBH dari Pemprov Sumut, serta PAD yang menurun. Anggaran yang ada saat ini akan dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kota Medan. Dikutip dari Antara News (2020), target pencapaian PAD Kota Surabaya tahun anggaran 2020 perlu direvisi akibat dari pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19 yang terjadi sekitar kurang lebih tiga bulan, cukup memukul perekonomian di Surabaya sehingga menurunnya PAD yang diperkirakan mencapai 50 persen.

Dari permasalahan pada Tribun Jogja (2017), dan Tribun Solo (2018) pengalokasian APBD Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal. Hal ini memberikan pengaruh untuk penggunaan PAD yang masih dianggap tidak optimal, yang mana bahwa pemerintah daerah tersebut masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan yang bersumberkan dari pemerintah pusat yang berguna untuk melaksanakan pendanaan untuk semua pengeluaran daerahnya tersebut. Namun pada tahun 2020 terjadi kasus pandemi Covid-19 dunia. Hal tersebut mengakibatkan pergerakan ekonomi di Indonesia, terutama pada tiap provinsi menjadi bermasalah. Seperti yang terjadi pada Berita Satu (2020) dan Antara News (2020), pengalokasian APBD di tiap daerah perlu dilakukan revisi. Hal tersebut juga membuat PAD pada daerah mengalami penurunan karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi Covid-19.

Menurut Juniawan & Suryantini (2018) mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) ini didefinisikan sebagai bagian pemasukan daerah

yang didapatkan atau bersumberkan dari sumber daya yang ada pada daerah itu sendiri yang tidak mencangkup dengan dana perimbangan dan juga penerimaan yang lain sebagainya. Besarnya PAD yang diterima oleh pemerintah daerah akan disesuaikan dengan alokasi belanja modal dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, jika PAD tersebut tinggi, hal ini akan memberikan pengaruh yang positif pada alokasi belanja modal tersebut. Hal ini memungkinkan pemerintah provinsi tersebut agar menciptakan infrastruktur dan memajukan daerahnya dengan mementingkan belanja modalnya. Berdasarkan penelitian Paramartha & Budiasih (2016) dan Aqnisa (2016), mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah ini memberi pengaruh yang positif pada belanja modal tersebut. Namun berbeda dengan penelitian Dwianto (2016), yang mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah ini memberi pengaruh yang negatif pada belanja modal tersebut.

Pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai satu dari berbagai sumber pendapatan yang fundamental untuk suatu daerah tertentu itu sendiri. Di tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap provinsi memiliki peningkatan dari tahun sebelumnya. PAD banyak di alokasikan ke belanja modal untuk peningkatan infrastruktur. Komponen yang berperan utama dalam peningkatan tersebut yaitu pajak daerah, kemudian di susul komponen lainnya seperti lain sebagainya yang sah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang terakhir retribusi daerah. Lalu pada awal tahun 2020, terjadi bencana pandemi Covid-19 yang membuat PAD pada tiap daerah mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terjadi pada pajak hotel dan restoran karna hampir tidak ada pengunjung

hotel dan restoran. Hal tersebut karena diberlakukannya pembatasan sosial pada tiap daerah. Pengalokasian pada anggaran yang ada akan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu pendapatan asli daerah pada belanja modal terlihat masih terdapat *research gap* yang berupa perbedaan hasil penelitian pada belanja modal. Kemudian dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, kondisi ini akan menarik untuk dilakukan penelitian ulang terkait pada pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal sebelum serta sesudah pandemi Covid-19.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilaksanakan Paramartha & Budiasih (2016) yang berkaitan dengan pengaruh dari PAD pada Belanja Modal itu sendiri. Perbedaan yang ada ialah bahwa penelitian ini akan membandingkan bagaimana PAD berpengaruh pada Belanja Modal sesudah dan juga sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Perbedaan lainnya ialah bahwa sampel penelitian yang diambil dari penelitiannya dengan penelitian terbaru juga berbeda yaitu penelitian sebelumnya menggunakan sampel Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2015, sementara itu untuk penelitian terbaru menggunakan sampel Pemerintah Provinsi yang ada pada Negara Indonesia tahun 2019-2020.

Merujuk pada uraian latar belakang penelitian yang disajikan tersebut di atas, dengan ini penulis berkeinginan agar melaksanakan pengkajian untuk pendapatan asli daerah pada belanja modal yang ada. Dengan demikian judul yang diambil untuk penelitian ini adalah: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap

Belanja Modal Dengan Pandemi Covid-19 Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020”.

1.2 Masalah Penelitian

Dilihat dari fenomena dan *research gap* pada penelitian ini yang menjadi permasalahan yaitu belanja modal harus di peruntukan untuk infrastruktur dan apabila semua biaya yang digunakan untuk pembiayaan pandemi Covid-19 maka anggaran belanja modal akan rendah. Merujuk pada berbagai penelitian terdahulu, bahwa penelitian mendapatkan hasil yang tidak konsisten dan juga sesuai, dengan demikian peneliti memiliki ketertarikan agar melaksanakan penelitian kembali berkenaan dengan PAD terhadap belanja modal dengan rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal pada Provinsi yang ada pada Negara Indonesia tahun 2019-2020.
2. Apakah pengaruh Covid-19 dapat memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal pada Provinsi yang ada pada Negara Indonesia tahun 2019-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian dan juga latar belakang penelitian ini yang diungkap tersebut di atas, oleh karena itu penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian sebagaimana di bawah ini:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal pada Provinsi yang ada pada Negara Indonesia tahun 2019-2020.

2. Untuk mengetahui pengaruh Covid-19 dapat memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal pada Provinsi yang ada pada Negara Indonesia tahun 2019-2020.

1.4 Manfaat Teoritis dan Praktis

Dari masalah dan tujuan yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian ini ialah sebagaimana di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi pihak Akademi

Hasil penelitian ini berguna sebagai sumbangan kontribusi untuk pihak akademis untuk memahami dan memperluas pengetahuan tentang belanja modal selama pandemi Covid-19 berlangsung dan memberikan wacana bagi perkembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan belanja modal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak pemerintah provinsi

Hasil penelitian ini mampu menyediakan gambaran kepada pihak pemerintah provinsi yang ada di Negara Indonesia mengenai pendapatan asli daerah terhadap belanja modal untuk sesudah dan juga sebelum pandemi Covid-19. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi peningkatan pelayanan publik di provinsi untuk sesudah dan juga sebelum pandemi Covid-19 berlangsung.

- b. Bagi pihak Penulis

Hasil penelitian ini diekspektasikan mampu menyediakan wawasan dan juga pengetahuan tambahan berkenaan dengan pengaruh pendapatan asli

daerah pada belanja modal sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 pada provinsi di Indonesia tahun 2019-2020 dan dapat menjadi ajang bagi penulis guna mengaplikasikan di bidang akuntansi pemerintahan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) didefinisikan sebagai suatu teori yang menerangkan keterkaitan hubungan antara *agent* (eksekutif) dengan *principal* (legislatif). Pihak legislatif (*principal*) didefinisikan sebagai pihak yang nantinya memberi rekomendasi, amanah, dan pesan pada pihak *agent* agar melaksanakan suatu layanan jasa tertentu dengan mengatasnamakan pihak *principal* tersebut, sedangkan itu pada pihak *agent* merupakan pihak yang diberikan mandat atau rekomendasi oleh *principal*. Menurut Halim & Abdullah (2006) menjelaskan bahwa teori keagenan ini didefinisikan sebagai suatu teori tertentu yang mengungkapkan atau memperjelaskan keterkaitan hubungan antara pihak *agent* dengan pihak *principal*, yang mana bahwa satu dari beberapa pihak dari *principal* tersebut menyusun suatu kontrak tertentu, baik itu yang secara eksplisit ataupun yang implisit, dengan melibatkan pihak *agent* yang tujuannya ialah agar pihak *agent* tersebut nantinya melaksanakan suatu pekerjaannya nanti sebagaimana diharapkan pihak *principal* itu sendiri. Pihak *principal*, dalam hal ini ialah berperan sebagai legislative, yakni menyediakan berbagai informasi yang berguna untuk pihak *agent* yang berperan sebagai pihak eksekutif agar melaksanakan pengolahan untuk berbagai informasi yang diberikannya tersebut.

Hasil dari pengolahan informasi ini berguna dalam mengambil keputusan yang dilaksanakan pihak principal tersebut nantinya.

Pada teori keagenan tidak senantiasa membuahkan hasil yang bagus, yang mana bahwa pihak principal tersebut mempunyai rasa yakin bahwa pihak agent tersebut tidak senantiasa melaksanakan yang paling baik demi kepentingan dan juga keperluan dari pihak principal itu sendiri. Menurut Astika (2010) menjelaskan bahwa teori keagenan ini mengungkapkan bahwa entitas ini dianggap sebagai hal yang begitu fundamental atas berbagai hubungan keagenan serta berupaya untuk mengerti beberapa perilaku organisasi dengan cara melaksanakan pengujian bagaimanakah beberapa pihak yang berkaitan dengan hubungan keagenan ini mampu mengoptimalkan utilitas yang ada dengan cara berkooperasi. Teori keagenan ini pada dasarnya ialah sebagai upaya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu kontrak tertentu berdasarkan pada upaya menyelarkan atau menyesuaikan kepentingan yang ada, dengan melibatkan pihak principal dengan pihak agent, dalam hal ini jika berlangsung terdapatnya suatu konflik kepentingan tertentu yang terjadi.

Di dalam sektor publik yang ada ini, keterkaitan hubungan keagenan ini juga dapat ditinjau berdasarkan dalam menyusun anggaran yang ada. Menurut Halim & Abdullah (2006) menjelaskan bahwa anggaran daerah ini didefinisikan sebagai perencanaan keuangan yang menjadi landasan dan juga dasar dalam melaksanakan layanan publik yang ada. Anggaran daerah, di Negara Indonesia ini dianggap sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik itu untuk kota, provinsi, dan juga kabupaten. Proses dalam menyusun anggaran ini ialah

dengan melibatkan dua pihak tertentu, yakni pihak legislatif dan juga eksekutif, tiap pihak tersebut memiliki tim penganggaran di dalamnya. Pihak eksekutif kemudian menyusun perancangan APBD yang berdasarkan pada KUA-PPAS, setelahnya diberikan pada pihak legislative agar dibahas dan juga dipelajari sebelum perancangan tersebut ditentukan sebagai peraturan daerah yang ada.

Eksekutif ini mempunyai berbagai keunggulan tertentu dalam hal menguasai berbagai informasi yang ada ketimbang pihak legislatif. Di dalam keunggulannya tersebut, hal ini sumbernya ialah berasal dari keadaan aktual bahwa pihak eksekutif ini didefinisikan sebagai pihak yang melaksanakan keseluruhan fungsi pemerintah provinsi serta keterkaitan hubungan yang secara langsung di dalam jangka panjang dengan pihak masyarakat. Eksekutif ini mempunyai pemahaman baik mengenai administrasi dan juga birokrasi serta aturan perundang-undang yang melatarbelakangi keseluruhan aspek pemerintahan yang ada. Pihak Eksekutif ini nantinya akan mempunyai suatu kecenderungan tertentu agar melaksanakan pengusulan anggaran belanja yang lebih tinggi diperbandingkan dengan yang aktual berlangsung sekarang ini. Hal yang sebaliknya, bahwa pihak eksekutif di dalam anggaran pendapatan ini akan melaksanakan pengusulan target yang lebih kecil supaya pada saat realisasi tersebut dilakukan, dengan demikian berbagai target yang ditentukan tersebut akan menjadi lebih mudah untuk diraih dan juga dicapai.

Perilaku oportunistik yang terjadi di dalam pihak legislatif ini berlangsung di dalam dua keadaan, yakni yang berperan sebagai pihak principal serta yang

selanjutnya ialah pihak agen. Pihak principal berperan sebagai pihak eksekutif ini dapat mewujudkan berbagai kepentingan yang ada dalam menyusun berbagai kebijakan yang dibutuhkan yang seakan-akan sebagai suatu kesepakatan yang melibatkan antara dua belah yang ada, namun hal ini memberikan keuntungan tertentu untuk pihak legislatif di masa mendatang dan berjangka panjang, baik itu secara institusional dan juga individual, sedangkan itu sebagai seorang agent untuk pemilih atau publik, tindakan dan juga perilaku oportunistik dari pihak legislatif akan terlihat lebih jelas dan juga transparan. Legislative dalam hal penganggaran seharusnya berupaya untuk memperjuangkan kepentingan dari para pemilihnya tersebut dengan cara melaksanakan semua akomodasi untuk kebutuhan publik dalam hal penganggaran tersebut.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Belanja Modal

Merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 2 tahun 2019 menjelaskan bahwa belanja modal didefinisikan sebagai bentuk pengeluaran anggaran agar mendapatkan asset tetap dan juga asset yang lainnya yang memberi manfaat tertentu selama lebih dari satu periode akuntansi yang ada dan terjadi. Merujuk pada pendapat yang dinyatakan Badrudin (2017, hal 71-72) menjelaskan bahwa belanja modal ini dilaksanakan pengkategorisasian ke dalam lima kategori yang utama, sebagaimana di bawah ini:

1. Belanja Modal Tanah ini didefinisikan sebagai bentuk pengeluaran yang dimaksudkan untuk pembebasan penyelesaian, Pembelian atau Pengadaan, baik itu untuk pembebasan penyelesaian yang berkaitan dengan pembuatan sertifikat, pematangan tanah, peralatan, pengurangan, pengosongan, balik nama dan sewa tanah, dan pengeluaran yang lain yang memiliki keterkaitan hubungan dengan perolehan dari hak atas tanah sampai tanah yang dimaksudkan sebut keadaannya siap untuk digunakan dengan baik dan selayaknya.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ini didefinisikan sebagai pengeluaran tertentu yang berguna agar dapat melaksanakan penggantian, penambahan dan bahkan pengadaan serta meningkatkan kapasitas mesin dan peralatan yang ada, serta inventaris kantor yang memberi berbagai manfaat lebih untuk kurun waktu satu tahun, dan sampai berbagai peralatan dan juga mesin yang dimaksudkan tersebut ada dalam keadaan yang siap untuk digunakan dengan baik dan selayaknya.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan ini didefinisikan sebagai bentuk pengeluaran yang berguna untuk melaksanakan penggantian, penambahan dan bahkan pengadaan, yang mencakup juga dengan pengeluaran untuk keperluan pengelolaan, perencanaan dan juga pengawasan pembangunan Gedung serta beberapa bangunan yang menambahkan kapasitas tertentu sampai Gedung dan juga bangunan yang dimaksudkan tersebut ada dalam keadaan yang siap untuk digunakan dengan baik dan selayaknya.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan ini didefinisikan sebagai bentuk dari pengeluaran yang berguna untuk keperluan penggantian, pengadaan dan juga penambahan, serta meningkatkan perawatan, pembangunan dan juga pembuatan yang ada, pengeluaran jenis ini mencakup juga dengan pengelolaan, perencanaan dan juga pengawasan jaringan, jalan dan juga irigasi yang berguna untuk menambahkan kapasitas dari jaringan, jalan dan juga irigasi tersebut ada dalam keadaan yang siap untuk digunakan dengan baik dan selengkapnya.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya ini didefinisikan sebagai pengeluaran yang berguna untuk keperluan perawatan, pembuatan, pembangunan, peningkatan, penggantian, penambahan, dan juga pengadaan fisik lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam kategori atau kriteria dari belanja, sebagai misalnya ialah irigasi, jalan, Gedung dan bangunan, mesin dan peralatan, modal tanah, dan juga jaringan, yang mencakup di dalam belanja ini diantaranya ialah jurnal ilmiah, buku-buku, hewan ternak dan tanaman, barang untuk museum, barang purbakala, pembelian barang-barang kesenian, dan juga belanja modal kontrak sewa beli.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah dikelompokkan yang terdiri dari dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan juga berbagai pendapatan daerah yang sah lainnya. Pendapatan asli daerah ini didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh dan dipungut pihak daerah berdasarkan peraturan daerah yang selaras pada aturan perundang-undangan yang ada (Badrudin, 2017:hal 52). Sedangkan, dana

perimbangan ini didefinisikan sebagai dana yang bersumberkan atas pendapatan APBN yang disalurkan pada pihak daerah guna melaksanakan pendanaan kebutuhan daerah dan juga melakukan desentralisasi ini (Badrudin, 2017: hal 100). Merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 menunjukkan bahwa sumber dari pendapatan daerah ini sumbernya ialah dari pendapatan asli daerah, dalam hal ini terdiri atas hasil dari pengelolaan untuk kekayaan daerah yang dipisah-pisahkan, hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, dan juga berbagai PAD yang sah lainnya.

Pajak daerah didefinisikan sebagai sumbangan kontribusi wajib pada pihak daerah yang terutang oleh badan ataupun orang pribadi yang memiliki sifat memaksa yang berlandaskan pada undang-undang, dengan cara tidak secara langsung memperoleh imbalan, serta dipergunakan agar memenuhi kepentingan dan juga keperluan daerah untuk kesejahteraan penduduk dari daerah itu sendiri (Badrudin, 2017, hal 52). Di dalam kelompok pendapatan asli daerah, pajak daerah ini diantaranya mencakup dengan: Pertama, pajak daerah provinsi ini terdiri atas pajak rokok dan air permukaan, bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Kedua, pajak daerah kabupaten/kota ini terdiri atas pajak mineral batuan dan bukan logam, pajak parkir, pajak bea perolehan hak atas bangunan dan tanah, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan, pajak reklame, pajak sarang burung walet, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, pajak restoran, pajak air tanah, pajak hotel, dan lain sebagainya.

Menurut Badrudin (2017, hal 52) menjelaskan bahwa retribusi daerah ini didefinisikan sebagai bentuk pemungutan yang dilaksanakan daerah sebagai bentuk pembayaran untuk keperluan layanan jasa ataupun memberikan perizinan tertentu yang diberikan atau disediakan pemerintah daerah demi kepentingan dan juga keperluan badan ataupun orang pribadi. Di dalam kelompok dari pendapatan asli daerah ini bahwa retribusi daerah ini di dalamnya mencakup sebagaimana di bawah ini:

1. Retribusi jasa umum didefinisikan sebagai layanan kepentingan dan kemanfaatan umum yang disediakan ataupun diberikan pihak pemerintah daerah untuk memungkinkan dinikmati atau diambil nilai gunanya untuk pihak badan ataupun orang pribadi. Dalam hal ini jenisnya mencakup dengan pengendalian menara telekomunikasi, layanan pendidikan, pengelolaan limbah cair, penggantian biaya cetak peta, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pengujian kendaraan bermotor, layanan pasar, layanan parkir di tepi jalan umum, layanan pemakaman, akta catatan sipil, penggantian biaya cetak KTP, layanan kebersihan, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya.
2. Retribusi jasa usaha ini didefinisikan sebagai bentuk dari pelayanan yang disediakan atau diperuntukkan oleh pihak pemerintah daerah dengan cara mengikuti berbagai prinsip komersial di dalamnya, yang mencakup dengan pelayanan pemanfaatan kekayaan daerah yang masih tidak dapat digunakan dengan optimal oleh pihak pemerintah daerah selama tidak disediakan atau diberikan oleh pihak swasta secara memadai. Dalam hal ini jenisnya

mencangkup dengan retribusi penjualan produksi usaha daerah, penyeberangan di air, tempat olahraga dan juga rekreasi, layanan kepelabuhan, Rumah potong hewan, tempat penginapan, Tempat khusus parkir, terminal, tempat pelelangan, pasar pertokoan dan grosir, retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan lain sebagainya.

3. Retribusi perizinan tertentu ini didefinisikan sebagai bentuk dari pelayanan perizinan tertentu yang disediakan ataupun diberikan pihak pemerintah daerah pada pihak badan ataupun orang pribadi yang dimaksudkan demi kepentingan pengawasan dan juga pengaturan untuk aktivitas dari pengoptimalan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana, prasarana, barang ataupun berbagai fasilitas tertentu demi kepentingan perlindungan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga kepentingan umum. Dalam hal ini jenisnya mencangkup dengan retribusi izin mendirikan bangunan, izin trayek, izin usaha perikanan, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol.

Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah ini dilaksanakan pemisahan ke dalam pendapatan asli daerah dalam hal ini meliputi dengan bagian laba atas penyertaan modal terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan juga perusahaan milik daerah, bagian keuntungan laba untuk penyertaan modal yang terdapat kepada Badan Usaha Milik Negara ataupun perusahaan milik pemerintah, serta bagian keuntungan laba atas penyertaan modal kepada kelompok usaha masyarakat dan juga perusahaan milik swasta (Badrudin, 2017, hal 53-54).

Terdapat berbagai pendapatan asli daerah yang sah lainnya, diantaranya ialah penerimaan daerah yang tidak mencangkup pada jenis pajak daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan retribusi daerah, hasil eksekusi atas jaminan, denda retribusi, bunga, Badan Layanan Umum Daerah (BLTUD), pelatihan, penyelenggaraan pendidikan, denda pajak, pengambilan, denda untuk keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan kerugian atas selisih nilai tukar rupiah pada mata uang asing, pengadaan barang atau layanan jasa yang dilaksanakan daerah, potongan dari penjualan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, penerimaan komisi, penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah, dan juga jasa giro (Badrudin, 2017, hal 54).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki keterkaitan hubungan dengan Analisis Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebagaimana dilampirkan seperti di bawah ini:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Alat Ukur	Hasil Penelitian
1.	Paramartha & Budiasih (2016)	Dependent : Belanja Modal Independent : PAD, DAU, DAK,	Regresi linier berganda	1. PAD memberi sumbangsih pengaruh positif pada Belanja Modal 2. DAU memberi sumbangsih pengaruh negatif pada Belanja Modal 3. DAK memberi sumbangsih pengaruh positif pada

				Belanja Modal 4. Terjadinya <i>flypapaer effect</i> .
2.	Pradana & Handayani (2017)	Dependent : Belanja Modal Independent : PAD, DAU, DAK	Regresi linier berganda	1. PAD memberi sumbangsih pengaruh positif pada Belanja Modal. 2. DAU memberi sumbangsih pengaruh positif pada Belanja Modal. 3. DAK memberi sumbangsih pengaruh positif pada Belanja Modal
3.	Aqnisa (2016)	Dependent : Belanja Modal Independent : PAD, DBH, DAU, DAK	Regresi linier berganda	1. PAD memberi sumbangsih pengaruh positif pada Belanja Modal. 2. DBH memberi sumbangsih pengaruh negatif pada Belanj Modal. 3. DAU memberi sumbangsih pengaruh positif pada Belanja Modal. 4. DAK memberi sumbangsih pengaruh positif pada Belanja Modal.
4.	Dwianto (2016)	Dependent : Belanja Modal Independent : PAD, DAU, DAK, DBH, Pertumbuhan Ekonomi	Regresi linier berganda	1. PAD memberi sumbangsih pengaruh negatif pada Belanja Modal. 2. DAU memberi sumbangsih pengaruh positif pada Belanja Modal. 3. DAK memberi sumbangsih

				<p>pengaruh positif pada Belanja Modal.</p> <p>4. DBH memberi sumbangsih pengaruh positif pada Belanja Modal.</p> <p>5. Pertumbuhan Ekonomi memberi sumbangsih pengaruh positif pada Belanja Modal.</p>
5.	Karwur, Ventje dan Jessy (2018)	<p>Dependent : Belanja Modal</p> <p>Independent : PAD dan DAU</p>	<p>Regresi linier berganda</p>	<p>1. DAU memberi sumbangsih pengaruh positif pada Belanja Modal.</p> <p>2. PAD memberi sumbangsih pengaruh negatif pada Belanja Modal.</p> <p>3. Terjadi fenomena <i>flypapaer effect</i>.</p>
6.	Juniawan & Suryantini (2018)	<p>Dependent : Belanja Modal</p> <p>Independent : PAD, DAU, DAK</p>	<p>Regresi linier berganda</p>	<p>1. PAD memberi sumbangsih pengaruh positif pada Belanja Modal</p> <p>2. DAU memberi sumbangsih pengaruh positif pada Belanja Modal</p> <p>3. DAK memberi sumbangsih pengaruh positif pada Belanja Modal</p>
7.	Azhar (2018)	<p>Dependent : Belanja Modal</p> <p>Independent : PAD dan</p>	<p>Regresi linier berganda</p>	<p>1. PAD memberi sumbangsih pengaruh positif pada Belanja Modal</p> <p>2. DAU memberi sumbangsih</p>

		DAU		<p>pengaruh positif pada Belanja Modal</p> <p>3. Terjadinya <i>flypaper effect</i>.</p>
8.	Hasbullah (2017)	<p>Dependent : Belanja Modal</p> <p>Independent : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK, Pertumbuhan Ekonomi.</p>	<p>Regresi linier berganda</p>	<p>1. Pajak memberi sumbangsih pengaruh positif pada Belanja Modal</p> <p>2. Retribusi Daerah memberi sumbangsih pengaruh positif pada Belanja Modal</p> <p>3. DAU memberi sumbangsih pengaruh negatif pada Belanja Modal</p> <p>4. DAK memberi sumbangsih pengaruh negatif pada Belanja Modal</p> <p>5. Pertumbuhan ekonomi memberi sumbangsih pengaruh negatif pada Belanja Modal</p>
9.	Setiyani (2015)	<p>Dependent : Belanja Modal</p> <p>Independent : DAU, PAD SILPA dan Luas Wilayah</p>	<p>Regresi linear berganda</p>	<p>1. DAU mempunyai keterkaitan hubungan yang positif pada Belanja modal</p> <p>2. PAD mempunyai keterkaitan hubungan yang negatif pada Belanja modal</p> <p>3. SILPA mempunyai keterkaitan hubungan yang negatif pada Belanja modal</p> <p>4. Luas Wilayah mempunyai</p>

				keterkaitan hubungan yang negatif pada Belanja modal
10.	Prasetya (2017)	Dependent : Belanja Modal Independent : PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Pegawai	Regresi linear berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAD mempunyai keterkaitan hubungan yang positif pada Belanja Modal. 2. DAU mempunyai keterkaitan hubungan yang negatif pada Belanja Modal. 3. DAK mempunyai keterkaitan hubungan yang positif pada Belanja Modal. 4. DBH mempunyai keterkaitan hubungan yang positif pada Belanja Modal. 5. Belanja Pegawai mempunyai keterkaitan hubungan yang positif pada Belanja Modal.

Sumber: Data yang diolah kembali (2020)

Merujuk pada tabel penelitian terdahulu yang dilampirkan tersebut di atas, dengan ini dapat diungkapkan perbedaan antara penelitian yang sekarang dengan terdahulu yaitu penambahan pada variabel. Pada penelitian terdahulu sebelumnya hanya ada variabel dependen dan independent, namun dengan penelitian yang sekarang ada penambahan pada variabel moderasi yaitu Pandemi Covid-19 itu sendiri.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Berkaitan dengan teori *agency*, apabila implementasi dari teori keagenan ini mampu menyebabkan munculnya berbagai hal yang positif dan juga baik yang berbentuk dengan efisiensi, maka pemerintah mampu menjalankan dengan baik, transparan, demokratis, adil dan tanggung jawab. Namun apabila timbul hal yang tidak baik atau negatif yang berbentuk dengan perilaku yang sifatnya oportunistik, hal tersebut berlangsung disebabkan dengan keegoisan masing-masing pihak *agent* (eksekutif) yang mempunyai beberapa keunggulan informasi namun pada *principal* (legislatif) memanfaatkan keunggulan kekuasaan sendiri. Hal ini menunjukkan timbulnya berbagai tindakan yang inproduktif dalam menyelenggarakan pemerintah provinsi secara keseluruhan. Menurut Pradana & Handayani (2017) apabila belanja modal tersebut dapat menaikkan partisipasi publik dalam proses pembangunan ini, maka kualitas layanan publik akan meningkat.

Salah satu indikator dalam pendapatan asli daerah ini didefinisikan sebagai bentuk dari kemandirian mengelola keuangan daerah tersebut. Dengan tingkatan kemandirian daerah tersebut semakin tinggi, dengan demikian rasio dari pendapatan daerah tersebut semakin tinggi juga. Ketika daerah tertentu mendapatkan dana dari pemerintah pusat yaitu PAD, maka sebagai pihak pemerintah daerah akan mengoptimalkan suatu pendapatan tertentu yang diperoleh berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja penyelenggaraan wajib diprioritaskan sebagai peningkatan kualitas hidup

masyarakat untuk memenuhi berbagai kewajiban dan juga tugas daerah yang dimanifestasikan berbentuk dengan peningkatan layanan dasar dan utama, dalam hal ini ialah fasilitas umum, sosial, pendidikan dan juga kesehatan yang memadai dan juga layak tersebut. Sehingga semakin tinggi PAD maka memungkinkan akan lebih banyak dialokasikan pada belanja modal tersebut.

Pada penelitian yang dilaksanakan Paramartha & Budiasih (2016) mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah memberi sumbangsih pengaruh yang positif pada belanja modal. Penelitian tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilaksanakan Juniawan & Suryantini (2018) dan Pradana & Handayani (2017) yang dimana bahwa pendapatan asli daerah memberi sumbangsih pengaruh yang positif pada belanja modal. Berdasarkan penjelasan dan penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagaimana di bawah ini:

H₁ = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.4.2 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal dengan Pandemi Covid-19 sebagai Pemoderasi

Berkaitan dengan teori *agency*, apabila penerapan teori keagenan dapat menyebabkan timbulnya berbagai hal yang tidak baik atau negatif yang berbentuk dengan perilaku oportunistik itu sendiri, hal tersebut berlangsung disebabkan dengan keegoisan masing-masing pihak *agent* (eksekutif) mempunyai keunggulan informasi namun pada *principal* (legislatif) memanfaatkan keunggulan kekuasaan sendiri. Hal ini menunjukkan timbulnya berbagai tindakan yang tidak

menghasilkan suatu hal yang baik (tidak produktif) dalam menyelenggarakan secara keseluruhan pemerintah provinsi ini.

Ketika suatu daerah mendapatkan dana dari pemerintah pusat yaitu PAD, maka sebagai pihak pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun saat terjadi pandemi covid-19 seperti tahun 2020, maka PAD pada pemerintah Provinsi mengalami penurunan karna diberlakukannya PSBB kurang lebih 5 bulan. Begitu juga untuk hasil dari PAD lebih banyak dioptimalkan untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 di setiap provinsi.

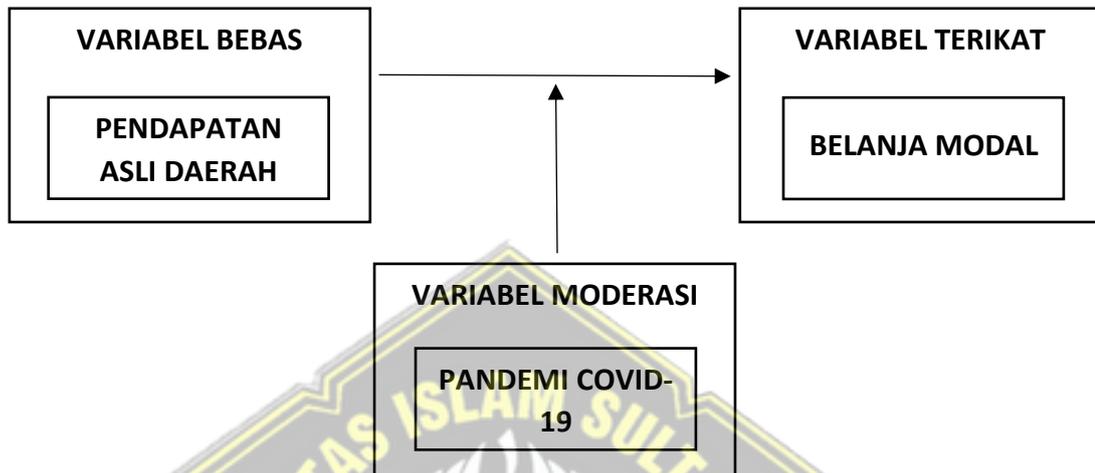
Pada penelitian Dwianto (2016) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah memberi sumbangsih pengaruh yang negatif pada belanja modal tersebut. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilaksanakan Setiyani (2015), dimana pendapatan asli daerah berpengaruh negatif pada belanja modal tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dengan ini dapat dilaksanakan perumusan penelitian untuk hipotesis kedua sebagaimana di bawah ini:

H₂ = Pandemi covid-19 Memoderasi Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

2.5 Kerangka Penelitian

Berdasarkan hasil pengembangan hipotesis yang dipaparkan tersebut di atas bahwa ada faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah pada belanja modal ini. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan faktor dari variabel moderasi yaitu pandemi covid-19 dimana variabel ini dapat

mengubah arah dari pendapatan asli daerah pada belanja modal. Maka bisa dibuat kerangka penelitian dan rangkaian hipotesis penelitian sebagaimana di bawah ini:



Gambar 2. 1
Kerangka Penelitian





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah berupa metode penelitian kuantitatif, hal ini disebabkan bahwa data penelitian ini ialah berbentuk dengan angka dan juga penganalisisan penelitian ini bersifat statistik. Metode kuantitatif ini dapat dianggap sebagai suatu metode penelitian yang berdasarkan terhadap filsafat positivisme, tujuannya ialah agar dapat melaksanakan penelitian terhadap sampel dan populasi penelitian itu sendiri (Sugiyono, 2010). Teknik dalam mengambil sampel penelitian ini dilaksanakan secara acak (*random*), dalam mengumpulkannya tersebut menggunakan instrumen penelitian, analisis data penelitian ini sifatnya ialah kuantitatif, yang dimaksudkan agar dapat melaksanakan pengujian hipotesis penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.

3.2 Populasi dan Sampel

Merujuk pada pernyataan yang dinyatakan Sugiyono (2010, hal 115) menjelaskan bahwa populasi penelitian ini didefinisikan sebagai wilayah atau tempat yang digeneralisasikan, dalam hal ini terdirikan atas subjek dan objek penelitian yang memiliki berbagai karakteristik dan jugakualitas tertentu yang sudah ditentukan pihak yang melaksanakan penelitian agar dapat dipelajari, kemudian dihasilkan penarikan kesimpulan penelitiannya tersebut. Untuk

penelitian ini, populasi penelitian yang dipilih ialah Pemerintah Provinsi yang ada pada Negara Indonesia Tahun 2019-2020.

Definisi sampel yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010, hal 116) menjelaskan bahwa sampel penelitian ini didefinisikan sebagai bagian tertentu atas karakteristik dan juga jumlah tertentu yang terdapat atau dari populasi penelitian itu sendiri. Untuk penelitian ini, pemilihan sampel penelitian ini ialah dengan menggunakan metode pengambilan sampel purposive (*purposive sampling method*). metode pengambilan sampel purposive (*purposive sampling method*) ini didefinisikan sebagai suatu metode dalam memilih sampel penelitian yang hendak dilaksanakan penelitian tertentu tersebut, yakni dengan cara menetapkan suatu kriteria tertentu. Kriteria dari sampel penelitian ini ialah sebagaimana di bawah ini:

1. Pemerintah Provinsi melaporkan laporan keuangan per semester berturut-turut dari Tahun 2019-2020.
2. Semua indikator variabel yang terdapat pada penelitian ini terdapat pada laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Untuk penelitian ini, data penelitian yang digunakan dan dikumpulkan ialah berupa data sekunder. Merujuk pendapat yang dikemukakan Sugiyono (2010, hal 193) menjelaskan bahwa data sekunder didefinisikan sebagai sumber data penelitian yang memberi ataupun menyediakan data penelitian pada pihak yang mengumpulkan data tersebut dengan cara yang tidak langsung. Data

penelitian yang diambil dan digunakan ini ialah berbentuk dengan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi yang ada pada negara Indonesia, yang berupa data realisasi PAD dan juga Belanja Modal yang diperoleh dari website/situs resmi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, metode dalam mengumpulkan data ini ialah dengan mengoptimalkan terdapatnya metode dokumentasi. Menurut Sugiyono (2010, hal 422) menjelaskan bahwa metode dokumentasi ini didefinisikan sebagai rangkaian pencatatan peristiwa yang telah berlangsung, dalam hal ini dapat berbentuk dengan gambar, tulisan, ataupun berbagai karya monumental dari seorang individu tertentu. Beberapa Data penelitian pada penelitian ini diperoleh dari website/situs resmi.

3.5 Variabel dan Indikator

3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel operasional ini berguna untuk melaksanakan penentuan skala dan juga jenis indikator variabel dari penelitian itu sendiri. Merujuk pada pernyataan yang dikemukakan Sugiyono (2010, hal 59) menjelaskan bahwa variabel penelitian didefinisikan sebagai suatu nilai, atribut ataupun sifat dari suatu aktivitas, objek ataupun seorang individu tertentu yang memiliki berbagai variasi tertentu yang ditentukan untuk dipelajari kemudian dihasilkan kesimpulan oleh peneliti ini. Skala pengukuran untuk variabel ini ialah berupa skala rasio. Merujuk pada pernyataan yang dikemukakan Ghazali (2013, hal 5) menjelaskan bahwa

skala rasio didefinisikan sebagai suatu skala interval serta mempunyai nilai dasar tertentu yang tidak memungkinkan untuk diubah. Terdapat beberapa variabel penelitian yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini, terdiri atas tiga variabel, diantaranya sebagaimana di bawah ini:

1. Variabel dependen (variabel terikat) untuk melangsungkan penelitian ini ialah berupa belanja modal
2. Variabel independen (variabel bebas) untuk melangsungkan penelitian ini ialah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Variabel moderasi untuk melangsungkan penelitian ini ialah berupa Pandemi Covid-19

3.5.2 Definisi Operasional Variabel

Dalam menguji setiap variabel dan pengukuran, maka dibuatlah suatu ringkasan yang dijelaskan pada tabel 2 sebagaimana di bawah ini :

Tabel 3. 1
Ringkasan Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Konsep	Alat Ukur	Skala
PAD (X)	Pendapatan yang didapatkan daerah, yang dilaksanakan pemungutan berlandaskan pada peraturan daerah yang selaras dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Badrudin (2017)	PAD = Hasil pajak daerah + retribusi daerah + hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rasio

<p>Belanja Modal (Y)</p>	<p>Belanja barang ataupun jasa yang dialokasikan terhadap pengeluaran APBD ini dipergunakan terhadap pengeluaran yang dilaksanakan dalam upayanya untuk menyelenggarakan pengadaan asset tetap yang berwujud, serta memiliki nilai manfaat tertentu selama lebih dari satu tahun yang diperuntukkan pada aktivitas atau pengoperasionalan pemerintahan. Badrudin (2017)</p>	<p>Belanja Modal = belanja tanah + belanja peralatan dan mesin + belanja gedung dan bangunan + belanja jalan, irigasi, dan jaringan + belanja aset lainnya</p>	<p>Rasio</p>
<p>Pandemi Covid-19 (Moderasi)</p>	<p>Pandemi Covid-19 ini dianggap sebagai peristiwa atau keadaan semakin besar penyebaran penyakit menular yang diakibatkan dengan terdapatnya coronavirus jenis varian baru menjangkiti seluruh dunia ini Wikipedia, (2020).</p>	<p>Kode 1 = tahun adanya pandemi Covid-19 Kode 0 = tahun sebelum adanya pandemi Covid-19</p>	<p>Dummy</p>

Sumber: Data yang diolah kembali (2020)

3.5.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ini didefinisikan sebagai pendapatan yang didapatkan atau dihasilkan suatu daerah tertentu, lalu dilaksanakan pemungutan berlandaskan atau berpedomankan terhap aturan daerah yang selaras dengan aturan perundang-undang yang saat ini berlaku (Badrudin, 2017). Variabel pendapatan asli daerah diukur menggunakan : PAD = hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + retribusi daerah + pajak daerah + berbagai pendapatan asli daerah yang sah lainnya (Badrudin, 2017).

3.5.2.2 Belanja Modal

Belanja modal ini ialah pengeluaran dari anggaran APBD untuk Belanja barang ataupun jasa yang dialokasikan terhadap pengeluaran APBD ini dipergunakan terhadap pengeluaran yang dilaksanakan dalam upayanya untuk menyelenggarakan pengadaan asset tetap yang berwujud, serta memiliki nilai manfaat tertentu selama lebih dari satu tahun yang diperuntukkan pada aktivitas atau pengoperasionalan pemerintahan (Badrudin, 2017). Maka variabel pada belanja modal dilaksanakan pengukuran berdasarkan pada: Belanja Modal = belanja jaringan, jalan dan juga irigasi + belanja bangunan dan gedung + belanja mesin dan peralatan + belanja tanah + belanja aset lain sebagainya (Badrudin, 2017).

3.5.2.3 Pandemi Covid -19

Pandemi Covid-19 Pandemi Covid-19 ini dianggap sebagai peristiwa atau keadaan semakin besar penyebaran penyakit menular yang diakibatkan dengan terdapatnya coronavirus jenis varian baru menjangkiti seluruh dunia ini

(Wikipedia, 2020). Alat ukur yang digunakan pada variabel Pandemi Covid-19 yaitu: Kode 1 digunakan untuk tahun adanya Pandemi Covid-19 dan kode 0 digunakan untuk tahun sebelum adanya Pandemi Covid-19.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Merujuk pada pernyataan yang dikemukakan Ghozali (2013, hal 19) menjelaskan bahwa statistik deskriptif ini didefinisikan sebagai data penelitian yang menyediakan deskripsi dan juga gambaran yang dapat ditinjau berdasarkan pada nilai dari *skewness* (kemencengan distribusi), *kurtois*, *sum*, *minimum*, *maksimum*, *varian*, *standar deviasi*, *mean*, dan lain sebagainya.

3.6.2 Metode Analisis Regresi Moderasi

Untuk penelitian ini, pengujian hipotesis penelitian yang digunakan ialah berupa *Moderated Regression Analysis* (MRA). Merujuk pernyataan yang dinyatakan Ghozali (2013) menjelaskan bahwa *Moderated Regression Analysis* ini memiliki perbedaan tertentu dengan analisis yang bersub-kelompok, hal ini disebabkan bahwa analisis ini mengoptimalkan penggunaan pendekatan analitik yang dimaksudkan agar menjaga integritas dari sampel penelitian itu sendiri serta menegaskan dasar dan pedoman agar dapat melaksanakan pengontrolan terhadap pengaruh dari variabel moderasi tersebut. Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \beta_3 X_i * Z_i + \varepsilon$$

Dimana :

- Y_i = Belanja Modal
 α = Konstanta
 β = Koefisien Regresi
 X = Pendapatan Asli Daerah
 Z = Pandemi Covid - 19
 ε = Standar Error

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk penelitian ini, data penelitian yang digunakan ini ialah berupa data sekunder, dengan ini bahwa pengujian yang melandasi model regresi yang terdapat pada asumsi klasik ini diantaranya mencangkup dengan pengujian normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan juga multikolinearitas.

3.6.3.1 Uji Multikolineraritas

Merujuk pernyataan yang dikemukakan Ghozali (2013) menjelaskan bahwa pengujian multikolinearitas berguna dalam melaksanakan pengujian bahwa apakah di dalam permodelan regresi yang digunakan ini didapatkan atau diidentifikasi terdapatnya hubungan korelasi yang terdapat dalam antar variabel bebas yang digunakan tersebut. Analisis regresi dinyatakan baik jika analisis tersebut bebas atas permasalahan tidak berlangsungnya hubungan korelasi yang terdapat pada antar variabel bebas penelitian tersebut (multikolinearitas). Metode atau cara agar dapat mengetahui atau mengidentifikasi apakah berlangsung gejala multikolinieritas atau tidak tidak ialah dengan cara meninjau *Variance Inflation Factor* (VIF) dan juga nilai *Tolerance*.

- a. Bila nilai dari *tolerance* ini lebih rendah diperbandingkan 0,1 dan sedangkan untuk nilai dari VIF ini lebih tinggi diperbandingkan 10, dengan ini berlangsung gejala multikolinearitas.
- b. Bila nilai dari *tolerance* ini lebih tinggi diperbandingkan 0,1 dan sedangkan untuk nilai dari VIF ini lebih rendah diperbandingkan 10, dengan ini tidak berlangsung gejala multikolinearitas

solusi untuk multikolinearitas yaitu :

- a. Dengan cara mengkombinasikan data *time-series* dengan data *cross-section* (*pooling data*). Transformasi variabel dianggap sebagai satu dari berbagai cara dalam meminimalkan keterkaitan hubungan yang linear yang terdapat pada antar variabel tersebut (first difference/delta dan juga logaritma natural).
- b. Mengeluarkan beberapa variabel independen yang mempunyai keterkaitan hubungan korelasi yang besar.
- c. Menggunakan model variabel independen yang memiliki keterkaitan hubungan atau korelasi yang besar, yang untuk keperluan memprediksi (janganlah melaksanakan penginterpretasian koefisien regresi tersebut).
- d. Menggunakan hubungan korelasi yang sederhana atau simpel yang terdapat pada tiap variabel terikat dan juga bebas agar dapat memahami dan mengidentifikasi keterkaitan hubungan antara variabel terikat dengan bebas tersebut.
- e. Menggunakan analisis yang lebih baik dan modern (Bayesian Regression).

3.6.3.2 Uji Autokorelasi

Merujuk pernyataan yang dikemukakan Ghozali (2013) menjelaskan bahwa pengujian autokorelasi ini dimaksudkan agar dapat melaksanakan pengujian apakah permodelan regresi linear ini terdapat hubungan korelasi antara variabel pengganggu yang terdapat pada periode t dengan pengganggu yang terdapat dalam periode $t-1$ yang sebelumnya. Bila terdapat keterkaitan hubungan korelasi, dengan demikian dinyatakan terdapat permasalahan yang ada dalam pengujian autokorelasi ini. Permasalahan ini timbul disebabkan dengan terdapatnya kesalahan pengganggu (residual) yang tidak bebas dari satu pengamatan tertentu terhadap pengamatan yang lain (*time series*).

Permodelan regresi dinyatakan baik dan tepat ialah jika permodelan regresi tersebut terbebas dari permasalahan pengujian autokorelasi ini. Merujuk pernyataan yang dinyatakan Ghozali (2013) menyebutkan bahwa cara atau metode yang digunakan agar dapat melaksanakan pendeteksian terhadap terdapat atau tidak terdapatnya permasalahan pengujian autokorelasi ini ialah dengan cara melaksanakan pengujian Durbin-Watson (*DW Test*). Pengujian ini hanya berguna untuk pengujian autokorelasi tingkatan satu (*first order autocorrelation*) serta mempersyaratkan terdapatnya konstanta (*intercept*) yang terdapat dalam permodelan regresi, serta tidak terdapatnya variabel yang terdapat di antara variabel bebas tersebut. Hipotesis penelitian yang diujikan ini ialah berupa Durbin Watson (DW test) sebagaimana di bawah ini:

$H_0 : r = 0$ tidak autokorelasi

$H_a : r \neq 0$ Ada autokorelasi

Tabel 3. 2

Pengambilan keputusan ada dan tidak adanya autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No desicison</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No desicison</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : Ghozali (2013, hal 111)

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Merujuk pernyataan yang dikemukakan Ghozali (2013, hal 139) menjelaskan bahwa pengujian heteroskedastisitas ini dimaksudkan agar dapat melaksanakan pengujian apakah di dalam permodelan regresi ini berlangsung pertidaksamaan variasi residual untuk satu pengamatan tertentu pada pengamatan yang lainnya. Permodelan dinyatakan baik ialah jika tidak terjadi heteroskedastisitas (homokedastisitas). Bila variansi residual untuk suatu pengamatan pada pengamatan yang lainnya tersebut bernilai konstan atau tetap, hal ini dinyatakan dengan homokedastisitas begitupun sebaliknya dinyatakan sebagai heteroskedastisitas.

Cara mendeteksi ada dan tidak adanya heteroskedastisitas yaitu :

- a. Melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$).
- b. Melihat bentuk pola seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar dan menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas.
- c. Melihat pola yang tidak jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas

3.6.3.4 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013, hal 160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Analisis Grafik, yaitu dengan melihat grafik histogram lalu membandingkan antara data penelitian dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya :
 - Jika data menyebar disekitaran garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
- b. Analisis Statistik yaitu dengan melihat nilai *kurtosis* dan *skewness* dari residual.

Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Pengambilan keputusan didasarkan dengan melihat nilai signifikan. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka distribusi data normal, sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal.

3.6.4 Uji Hipotesis

3.6.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2013, hal 97) Koefisien determinasi merupakan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti keterbatasan kemampuan variabel independen dalam mendiskripsikan variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Agar dapat mengkaji koefisien determinasi pada penelitian ini maka digunakan Adjusted R^2 supaya mendapatkan model regresi terbaik. Secara sistematis:

- a. Jika nilai $R^2 = 1$, maka Adjusted $R^2 = R^2 = 1$

- b. Jika nilai $R^2 = 0$, maka $\text{Adjusted } R^2 = (1 - k) / (n - k)$
- c. Jika $k > 1$, maka $\text{Adjusted } R^2$ akan bernilai negatif

3.6.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghazali (2013, hal 98) Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara kebersamaan terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria pengambilan keputusan :

- a. Jika tingkat signifikan F dari hasil pengujian $< 0,05$ maka variabel independent secara serentak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
- b. Jika nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka H_0 (Hipotesis nol) ditolak dan H_a (Hipotesis alternatif) diterima.

3.6.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Menurut Ghazali (2013, hal 98) Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara individu.

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika signifikan $t < 0,05$ maka suatu variabel independen secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen sebaliknya, apabila signifikan $t > 0,05$ maka suatu variabel independen secara individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

- b. Jika $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
Sebaliknya jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling method*, dimana sampel yang akan diteliti ditentukan dengan suatu kriteria. Kriteria pertama, Pemerintah Provinsi melaporkan laporan keuangan per semester berturut-turut dari Tahun 2019-2020. Kedua, semua indikator variabel dalam penelitian ini terdapat pada laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 34 Provinsi di seluruh Indonesia yang mengeluarkan laporan realisasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) per semester selama periode 2019-2020. Laporan tersebut diperoleh dari website resmi <https://jateng.bps.go.id/>. Pengambilan sampel dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 1

Distribusi sampel

Pertimbangan/Kriteria	Jumlah Pemerintah
Jumlah Provinsi di Indonesia	34
Total Sampel per semester Selama 2 tahun 2019-2020	136

Sumber: Data diolah tahun 2021

4.1.2 Deskriptif Variabel

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk mendeskriptifkan mengenai variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independennya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel dependennya yaitu Belanja Modal. Pengukuran yang digunakan dalam analisis ini yaitu menggunakan nilai maksimum, minimum, rata-rata serta standar deviasi. Berikut tabel hasil analisis statisti deskriptif menggunakan SPSS 22:

Tabel 4. 2
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	136	530765960 00	575611623090 00	363020962413 9.71	74025150351 00.261
BM	136	244236210 00	180412477380 00	918271177882. 35	19242427264 37.092
Pandemi	136	.00	1.00	.5000	.50185
Valid N (listwise)	136				

Sumber: Data diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah pengamatan yang diteliti sebanyak 136 pengamatan, berdasarkan 2 periode per semester terakhir laporan APBD (2019-2020). Variabel Belanja Modal (BM) memiliki nilai minimum sebesar Rp 24 Miliar yaitu pada Provinsi Banten tahun 2020 semester 1 dan nilai maksimum sebesar Rp 18 Triliun ada pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 semester 2. Variabel BM menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp 918 Miliar,

artinya selama periode 2019-2020 per semester diperoleh rata-rata belanja modal sebesar Rp 918 Miliar. Dan untuk standar deviasi sebesar Rp 1,924 Triliun yang dapat diartikan bahwa variabel belanja modal mempunyai standar deviasi yang lebih besar daripada rata-rata sehingga sebarannya tidak merata.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar Rp 53 Miliar yaitu pada Provinsi Maluku Utara tahun 2020 semester 1 dan nilai maksimum sebesar Rp 57 Triliun ada pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 semester 2. Variabel PAD menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp 3,630 Triliun, artinya selama periode 2019-2020 per semester diperoleh rata-rata PAD sebesar Rp 3,630 Triliun. Dan untuk standar deviasi sebesar Rp 7 Triliun, yang artinya bahwa variabel pendapatan asli daerah mempunyai standar deviasi yang lebih besar daripada rata-rata sehingga sebarannya tidak merata.

Variabel Pandemi memiliki nilai minimum sebesar 0 yaitu pada Provinsi yang mengeluarkan laporan keuangan APBD tahun 2019 semester 1 dan 2, kemudian nilai maksimum sebesar 1 pada Provinsi yang mengeluarkan laporan keuangan APBD tahun 2020 semester 1 dan 2. Variabel Pandemi menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,500 artinya 50,0% dari seluruh pengeluaran APBD tahun 2019-2020 mengalami efek dari pandemi. Dan untuk standar deviasi sebesar 0,50185 yang artinya bahwa variabel pandemi mempunyai standar deviasi yang sama dengan rata-rata sehingga sebarannya merata.

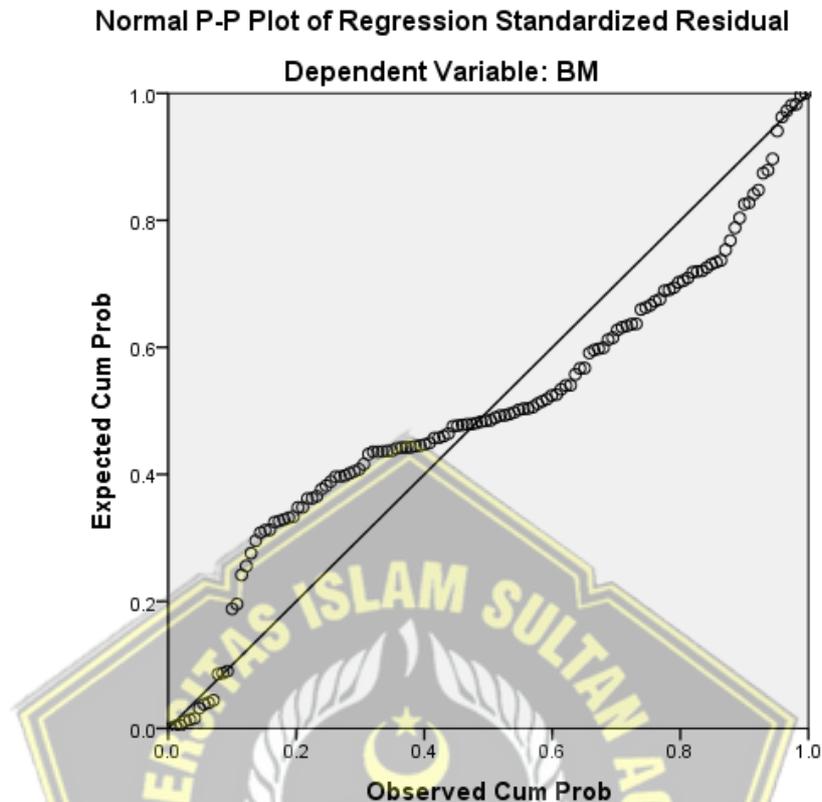
4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier terhadap variabel dependen dan variabel independent dengan tambahan variabel moderasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal dan variabel moderasi adalah Pandemi.

Variabel tersebut digunakan supaya model regresi yang dipakai dapat menghasilkan nilai untuk memenuhi keempat dari uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan yang terjadi guna mendapatkan hasil regresi yang baik.

4.1.3.1 Hasil Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013, hal 160) uji normalitas bertujuan untuk menguji antara variabel bebas dengan variabel terikat apakah memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data didalam penelitian ini adalah digunakan dengan uji P-P Plot. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka asumsi kenormalan terpenuhi. Berikut adalah uji normalitas menggunakan P-P Plot:



Gambar 4. 1

Grafik normal P-P Plot

Sumber: Data diolah tahun 2021

Berdasarkan hasil olah SPSS 22 pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa data tidak mengikuti arah garis diagonal dan menyebar menjauh dari diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa grafik normal p-p plot tidak berdistribusi normal. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas dengan statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S):

Tabel 4. 3

Uji Statistik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		136
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000880
	Std. Deviation	9032722716
		99.29210000
Most Extreme Differences	Absolute	.167
	Positive	.129
	Negative	-.167
Test Statistic		.167
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

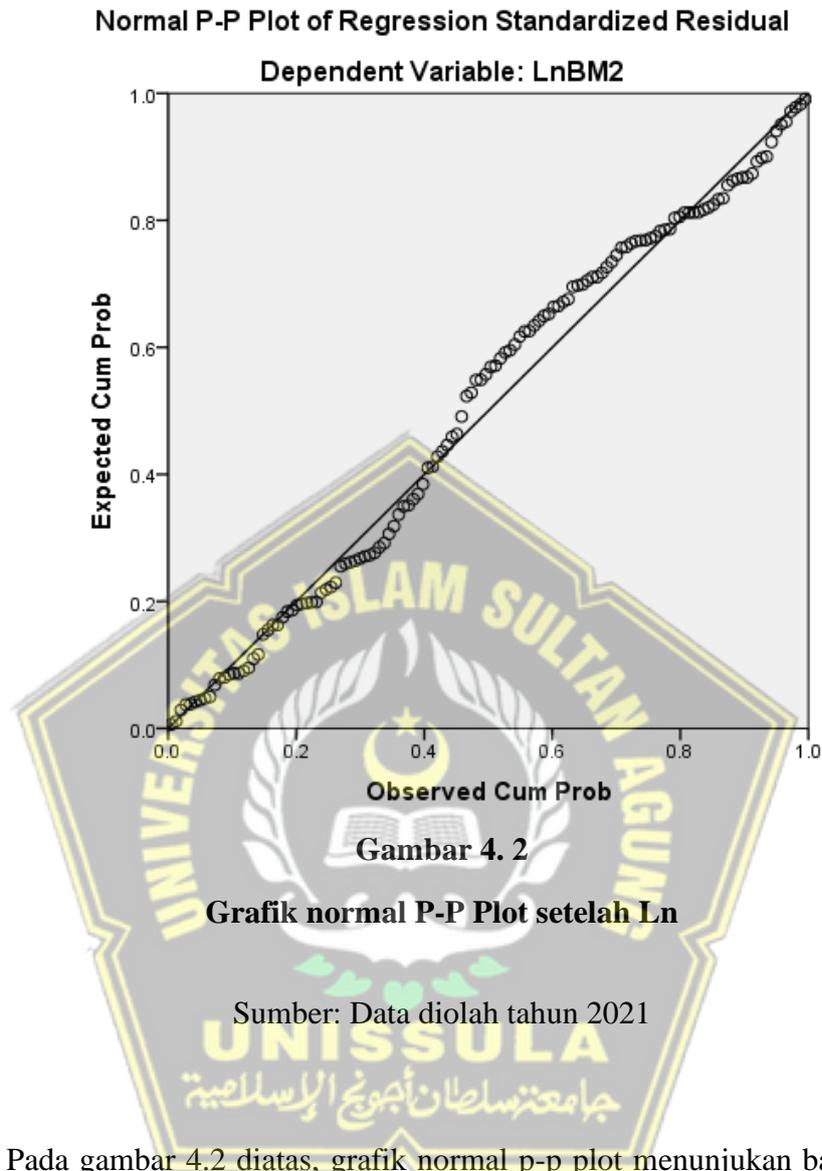
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah tahun 2021

Pada tabel 4.3 diatas berdasarkan sampel yang ditetapkan sebanyak 136 sampel, setelah di uji normalitasnya, tidak memenuhi asumsi normalitas karena nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Data yang tidak normal di normalkan dengan menghilangkan data ekstrim yang muncul. Hasil pengujian normalitas menggunakan P-P Plot sebagai berikut:



Pada gambar 4.2 diatas, grafik normal p-p plot menunjukkan bahwa grafik normal p-p plot berdistribusi secara normal karena data tidak menjauh dan mengikuti arah garis diagonal. Data yang tidak normal di normalkan dengan langkah menghilangkan data ekstrim. Hasil pengujian normalitas dengan dengan uji Statistik Kolmogorov-Smirno (K-S) Ln sebagai berikut:

Tabel 4. 4

Uji Statistik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* setelah Ln

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		132
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.74540343
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.073
	Positive	.051
	Negative	-.073
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.083 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah tahun 2021

Pada tabel diatas, berdasarkan sampel yang ditetapkan sebanyak 132 sampel setelah diuji normalitas memenuhi asumsi normalitas karena nilai signifikansi K-S $0,083 > 0,05$, sehingga disimpulkan data berdistribusi normal.

4.1.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah setiap variabel bebas berkorelasi tinggi satu dengan yang lain atau tidak. Cara untuk mengetahui terjadi multikolinieritas atau tidak dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* sebagai berikut:

Tabel 4. 5

Uji Multikolinieritas dengan Nilai Tolerance dan VIF

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	11.896	2.284		5.209	.000		
LnPAD2	.487	.067	.536	7.218	.000	1.000	1.000
PAND EMI	-.143	.657	-.016	-.218	.828	1.000	1.000

a. Dependent Variable: LnBM2

Sumber: Data diolah Tahun 2021

Berdasarkan hasil olah data SPSS 22 pada tabel 4.5 mempunyai nilai VIF masing-masing variabel < 10 yaitu LnPAD2 sebesar 1,000 dan Pandemi 1,000 dengan demikian tidak terjadi multikolinieritas atau nilai *tolerance* masing-masing variabel > 0,10 yaitu LnPAD2 sebesar 1,000 dan Pandemi 1,000 sehingga tidak terjadi multikolinieritas.

4.1.3.3 Hasil Uji Autokorlasi

Menurut Ghozali, (2013, hal 110) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah pada autokorelasi. Masalah ini muncul

karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (time series). Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (DW test). Berikut tabel hasil uji Autokorelasi menggunakan SPSS 22:

Tabel 4. 6

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.537 ^a	.288	.277	3.77433	.809

a. Predictors: (Constant), PANDEMI, LnPAD2

b. Dependent Variable: LnBM2

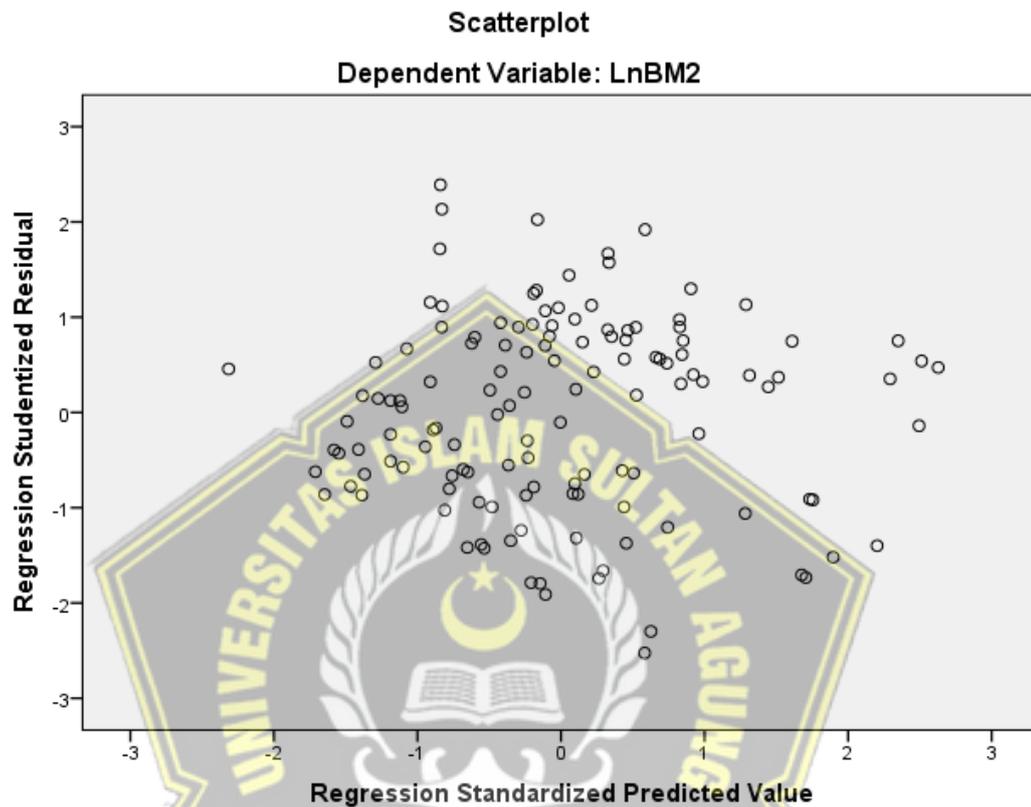
Sumber: Data diolah tahun 2021

Berdasarkan hasil olah data SPSS 22 pada tabel 4.6 mempunyai nilai Durbin Watson sebesar 0,809 akan dibandingkan dengan nilai tabel pada taraf signifikansi 5%, jumlah sampel 132 responden dengan 2 variabel bebas, ditemukan nilai batas atas (d_u) = 1,747 dan batas bawah (d_l) = 1,685. Kesimpulannya, terjadi autokorelasi karena nilai Durbin Watson = 0,809 terletak diantara dibawah batas bawah ($0 < d = 0,809 < d_l = 1,685$).

4.1.3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013, hal 139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat scatterplot antara SRESID dan ZPRED sebagai berikut:



Gambar 4.3

Uji Heterokedastisitas dengan Grafik Scatterplot setelah Ln

Sumber: Data diolah tahun 2021

Pada gambar 4.3 grafik scatterplots menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasititas pada model regresi. Supaya hasil pengujian akurat maka diperlukan Uji *Glejser* sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Hasil Uji Glejser setelah Ln

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.026	1.214		.845	.400
	LnPAD2	.059	.036	.142	1.636	.104
	PANDEM I	.351	.349	.087	1.005	.317

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber: Data Diolah tahu 2021

Pada tabel 4.7 memperlihatkan jika variabel independent dan variabel moderasi signifikan, karena nilai signifikansi variabel indenpenden LnPAD2 dan variabel moderasi mempunyai nilai signifikansi di atas 0,05. Artinya, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

4.1.4 Hasil Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan uji regresi yang meliputi uji signifikansi simultan (uji F), selanjutnya uji koefisien determinasi (R^2) dan uji signifikansi simultan (Uji T). Berikut adalah hasil dari pengolahan regresi dengan menggunakan program SPSS:

4.1.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 8
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.536 ^a	.288	.282	3.76048
2	.537 ^b	.288	.277	3.77433
3	.537 ^c	.288	.271	3.78886

a. Predictors: (Constant), LnPAD2

b. Predictors: (Constant), LnPAD2, PANDEMI

c. Predictors: (Constant), LnPAD2, PANDEMI, MODERASI

Sumber: Data diolah tahun 2021

Berdasarkan hasil SPSS 22 diatas, nilai *R Square* menunjukkan koefisien determinasi pada tabel 4.8 tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan. Artinya variabel moderasi pada penelitian tidak berpengaruh pada variabel PAD terhadap variabel Belanja Modal. Nilai *R Square* sebesar 0,288 menunjukkan bahwa variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independent dan variabel moderasi yaitu 28,8%, sedangkan sisanya sebesar 71,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

4.1.4.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berikut tabel hasil uji signifikansi simultan menggunakan SPSS 22:

Tabel 4. 9
Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	742.634	1	742.634	52.516	.000 ^b
	Residual	1838.353	130	14.141		
	Total	2580.987	131			
2	Regression	743.313	2	371.656	26.089	.000 ^c
	Residual	1837.674	129	14.246		
	Total	2580.987	131			
3	Regression	743.487	3	247.829	17.264	.000 ^d
	Residual	1837.500	128	14.355		
	Total	2580.987	131			

a. Dependent Variable: LnBM2

b. Predictors: (Constant), LnPAD2

c. Predictors: (Constant), LnPAD2, PANDEMI

d. Predictors: (Constant), LnPAD2, PANDEMI, MODERASI

Sumber: Data diolah tahun 2021

Berdasarkan data hasil SPSS 22 pada tabel menunjukkan:

1. F hitung sebesar 17,264 > F tabel sebesar 3,07 artinya bahwa LnPAD2 dan moderasi Pandemi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
2. Tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, hal ini menunjukkan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Modal atau secara bersamaan LnPAD2 dan moderasi pandemi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

4.1.4.3 Hasil Uji Regresi

Berikut tabel hasil uji regresi menggunakan SPSS:

Tabel 4. 10
Hasil Uji Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.820	2.248		5.257	.000
	LnPAD2	.487	.067	.536	7.247	.000
2	(Constant)	11.896	2.284		5.209	.000
	LnPAD2	.487	.067	.536	7.218	.000
	PANDEMI	-.143	.657	-.016	-.218	.828
3	(Constant)	11.652	3.193		3.649	.000
	LnPAD2	.494	.095	.544	5.187	.000
	PANDEMI	.351	4.531	.040	.077	.938
	MODERA SI	-.015	.135	-.057	-.110	.912

a. Dependent Variable: LnBM2

Sumber: Data diolah tahun 2021

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LnBM2} = 11,652 + 0,494 (\text{LnPAD2}) - 0,015 (\text{Moderasi}) + e$$

1. Nilai koefisiensi konstan dalam model regresi mempunyai koefisien positif sebesar 11,652 dengan nilai sig 0,000 (<0,05) yang berarti jika variabel lain dianggap tetap, maka anggaran belanja modal mengalami peningkatan Rp 11,652

2. Variabel PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 0,494 artinya setiap PAD naik 1rupiah maka akan meningkatkan belanja modal 49,4%
3. Variabel Covid-19 memoderasi negatif antara hubungan PAD terhadap belanja modal. Artinya apabila ada penambahan kasus Pandemi Covid-19 pada tahun berikutnya, maka nilai belanja modal akan menurun sebesar -1,5%.

4.1.4.4 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Dari hasil output SPSS 22 pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa uji parameter individu / parsial (uji t) sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama diterima, terbukti sig $t = 0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $5,187 > t$ tabel sebesar $1,978$, artinya PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sehingga dapat dikatakan semakin tinggi PAD maka semakin tinggi Belanja Modal.
2. Hipotesis kedua ditolak, karena terbukti dimana sig $t = 0,912 > 0,05$ dan t hitung $-0,110 > t$ tabel $-1,978$, artinya Pandemi Covid-19 berpengaruh negatif dan tidak signifikan atau dapat dikatakan tidak mampu memoderasi pada variabel PAD terhadap variabel Belanja Modal.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini sejalan dengan hasil

penelitian uji parsial yaitu PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama **diterima**. Menurut Badrudin (2017) PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu indikator PAD yaitu mandiri dalam mengelola finansial daerah, semakin tinggi PAD maka semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.

Hubungan penelitian ini dengan teori keagenan sebagai landasan teori yang digunakan, yaitu memiliki tujuan yang sama antara pihak agen (eksekutif) sebagai pemerintah pusat dan prinsipal (legislatif) sebagai pemerintah pusat yang menyebabkan PAD berpengaruh positif dan hasil uji berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan dengan baik, transparan, adil, demokratis, dan bertanggung jawab.

Penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Paramartha & Budiasih (2016) bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian ini sejalan dengan Juniawan & Suryantini (2018) yaitu PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan oleh pembiayaan pelaksanaan provinsi tiap tahun meningkat.

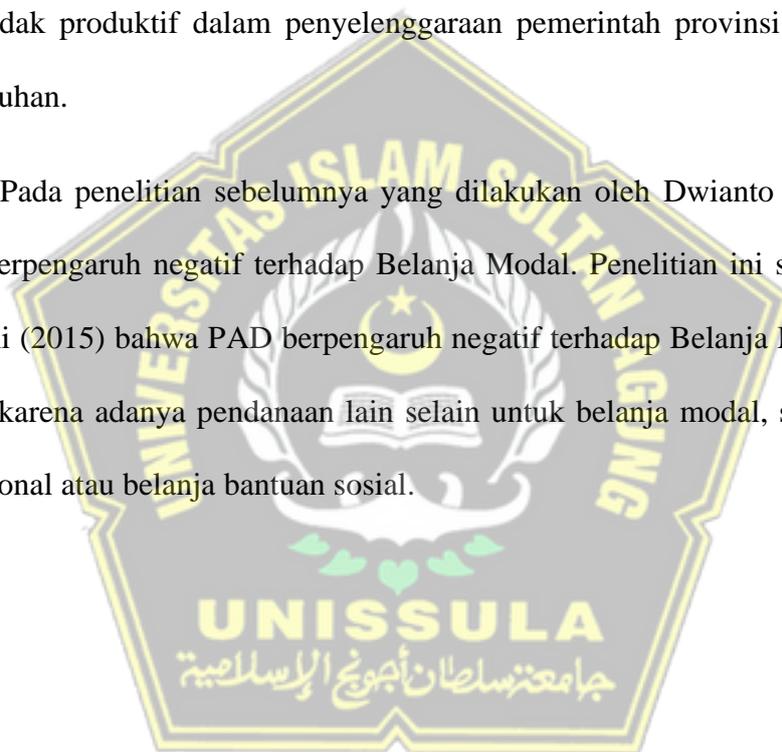
4.2.2 Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal dengan Pandemi Covid-19 sebagai pemoderasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa Pandemi Covid-19 sebagai pemoderasi berpengaruh negatif tidak signifikan pada hubungan PAD terhadap belanja modal. Berbanding terbalik dengan hipotesis yaitu Pandemi Covid-19 sebagai pemoderasi berpengaruh positif signifikan pada hubungan PAD

terhadap belanja modal. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua **ditolak**. Hal tersebut terjadi berdasarkan pada uji t variabel ini tidak signifikan karena nilai probabilitas yang ditentukan yaitu $0,912 > 0,05$. Sedangkan apabila di uji Bersama-sama menggunakan uji F maka variabel ini bersifat signifikan. Lalu hasil dari hipotesis kedua berlawanan arah dengan hasil yang telah ditentukan dan tidak terjadi signifikan karena hasil penelitian ini terjadi pada tahun awal pandemi dimulai, apabila pandemi ini berlangsung dalam jangka panjang diperkirakan akan menurunkan belanja modal. Maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dampak dari Covid-19 antara PAD terhadap belanja modal apabila pandemi ini berlangsung jangka panjang. Adapun alasan lainnya karena data pada tahun terjadinya covid masih sedikit kasus covid yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari Merdeka (2020), tercatat perkembangan kasus baru positif covid-19 hingga akhir tahun 2020 bertambah 8.074 dengan total menjadi 743.198 kasus, sehingga pengalihan anggaran untuk anggaran covid masih sedikit. Seperti dikutip Kontan (2020), BPK mencatat total anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 1.035,2 Triliun yang terdiri dari APBN, APBD, BUMN, dan BUMD. Penelitian ini sama seperti pada penelitian Maulana & Nubatonis (2020) yaitu variabel dummy Covid-19 tidak berpengaruh secara nyata berdasarkan uji-t, namun berpengaruh nyata apabila di uji bersama-sama menggunakan uji F. Menurut Wikipedia (2020) Pandemi Covid-19 merupakan suatu peristiwa menyebarnya penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang tersebar diseluruh dunia.

Hubungan penelitian ini dengan teori keagenan sebagai landasan teori yang digunakan, yaitu terjadinya perilaku oportunistik yang dimanfaatkan oleh pihak agen (eksekutif) sebagai pemerintah pusat dan prinsipal (legislatif) sebagai pemerintah provinsi yang menyebabkan pandemi berarah negatif tidak signifikan pada PAD terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki hubungan konflik dan saling bertentangan berakibat munculnya tindakan-tindakan yang tidak produktif dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi secara keseluruhan.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwianto (2016) bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Penelitian ini sejalan dengan Setiyani (2015) bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Hal ini terjadi karena adanya pendanaan lain selain untuk belanja modal, seperti belanja operasional atau belanja bantuan sosial.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa PAD terhadap Belanja Modal dengan Pandemi Covid-19 sebagai variabel moderasi pada pemerintah di Indonesia tahun 2019-2020. Berdasarkan analisis data penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 136 sampel selama periode waktu 2 tahun dengan menggunakan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA), maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis pertama yaitu PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan dengan baik dan tanggung jawab terhadap pemerintahannya.
2. Pandemi Covid-19 berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada PAD terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis kedua yaitu pandemi Covid-19 berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dilihat dari pandemi Covid-19 yang bernilai $-0,015$ dan tidak signifikan menunjukkan apabila pandemi ini berlangsung dalam jangka panjang, diperkirakan akan menurunkan nilai belanja modal dan mungkin akan menghasilkan pengaruh positif dan signifikan.

5.2 Implikasi

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan atau memasukan variabel lain yang lebih bervariasi seperti pertumbuhan ekonomi atau kebijakan pemerintah. Serta dapat memperluas periode penelitian dan menggunakan sampel yang lebih agar keterbatasan pada penelitian ini dapat diperbaiki dan hasil yang diperoleh semakin akurat.
2. Bagi Pemerintah Provinsi, diharapkan lebih meningkatkan anggaran yang diprioritaskan untuk belanja modal karena melihat dari Pengaruh PAD yang positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya peningkatan anggaran belanja modal untuk kemajuan daerah provinsi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

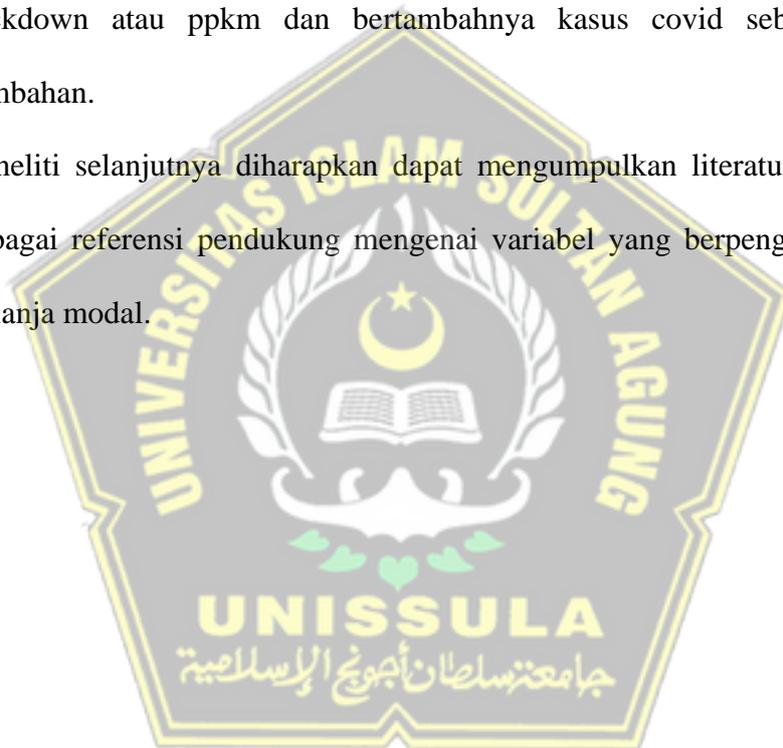
Penelitian ini telah berusaha mengembangkan penelitian terdahulu. Namun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini. Adapun beberapa keterbatasan tersebut yaitu:

1. Dalam penelitian ini, peneliti tidak memperhatikan faktor eksternal seperti pengambilan data yang hanya melalui website BPS, penerapan lockdown atau ppkm di masyarakat, dan bertambahnya kasus covid di Indonesia.
2. Kurangnya literatur-literatur pendukung yang dapat diperoleh penulis mengenai pengaruh PAD terhadap belanja modal dengan Covid-19 sebagai pemoderasi untuk menjadi acuan dalam penyusunan skripsi.

5.4 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat mencerminkan hasil penelitian yang lebih berkualitas di masa mendatang dengan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mengambil data langsung ke kantor BPS untuk informasi data yang lebih akurat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan penerapan lockdown atau pppk dan bertambahnya kasus covid sebagai variabel tambahan.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengumpulkan literatur-literatur lain sebagai referensi pendukung mengenai variabel yang berpengaruh terhadap belanja modal.



DAFTAR PUSTAKA

- Aqnisa, R. F. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. In *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Astika, P. I. B. (2010). *Teori Akuntansi: Konsep-Konsep Dasar Akuntansi Keuangan*. Buku Satu. Buku Ajar Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Azhar, M. R. (2018). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. In *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah* (Edisi 2). UPP STIM YKPN.
- Dwianto, A. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. In *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Ferri, R. (2017, December 20). *Serapan di Tiga Daerah di Jawa Tengah Rendah, Pembangunan Tidak Optimal*. *Tribun Jogja*. <https://jogja.tribunnews.com/2017/12/20/serapan-di-ketiga-daerah-di-jawa-tengah-rendah-pembangunan-tidak-optimal?page=all>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (Edisi 7). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hakim, A. (2020). *Target PAD Surabaya direvisi dampak Covid-19*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/1539928/target-pad-surabaya-direvisi-dampak-covid-19>
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53–64.
- Hasbullah, R. N. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. In *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255–1281. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05>
- Karwur, J. C., Ilat, V., & Warongan, J. D. . (2018). Flypaper Effect Atas Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 88–98. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19104.2018>
- Maulana, A. S., & Nubatonis, A. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Nilai Ekspor Pertanian Indonesia. *Agrimor*, 5(4), 69–71. <https://doi.org/10.32938/ag.v5i4.1166>
- Moerti, W. (2020). *Data Terkini Covid-19 di Indonesia Desember 2020*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-covid-19-di-indonesia-desember-2020.html>
- Paramartha, M., & Budiasih, I. (2016). Analisis Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Khusus Pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1536–1564.
- Pradana, Y. E., & Handayani, N. (2017). Pengaruh PAD , DAU dan DAK

Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 868–889.

Prasetya, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). In *Skripsi*. Universitas Negri Padang.

Saputro, I. (2018, October 2). *Masuki Triwulan III, Serapan APBD Solo Masih 47 Persen*. Tribun Solo. <https://solo.tribunnews.com/2018/10/02/masuki-triwulan-iii-serapan-apbd-solo-masih-47-persen>

Setiyani, R. D. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. In *Naskah Publikasi*. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>

Sianturi, A. H. (2020, April 19). *Pandemi Covid-19, Pemkot Medan Sesuaikan Alokasi APBD 2020*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/nasional/622633-pandemi-covid19-pemkot-medan-sesuaikan-alokasi-apbd-2020>

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Edisi 2). Alfabeta.

Suryanto, V. (2020). *BPK: Total anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 1.035,2 triliun*. Kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/bpk-total-anggaran-penanganan-covid-19-mencapai-rp-10352-triliun>

Wikipedia. (2020). *Pandemi Covid-19*. Wikipedia Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19



Lampiran 1 Rekap Data APBD Per Semester Tahun 2019-2020 Seluruh

Provinsi di Indonesia

Rekap Data APBD Per Semester Tahun 2019-2020

Seluruh Provinsi di Indonesia

Tahun	No	Nama Provinsi	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal
2019 SEMESTER I	1	Provinsi Aceh	1.044.452.212.000	227.120.146.000
	2	Provinsi Sumatera Utara	2.821.531.146.000	35.486.407.000
	3	Provinsi Sumatera Barat	1.102.553.849.000	132.209.172.000
	4	Provinsi Riau	1.595.505.015.000	153.064.199.000
	5	Provinsi Jambi	715.016.989.000	42.895.357.000
	6	Provinsi Sumatera Selatan	1.528.168.167.000	149.897.152.000
	7	Provinsi Bengkulu	225.190.237.000	60.456.028.000
	8	Provinsi Lampung	804.917.171.000	266.294.970.000
	9	Provinsi DKI Jakarta	17.231.938.675.000	1.537.509.074.000
	10	Provinsi Jawa Barat	10.079.104.785.000	269.360.744.000
	11	Provinsi Jawa Tengah	8.833.429.651.000	462.970.231.000
	12	Provinsi DI Yogyakarta	1.018.741.205.000	391.154.587.000
	13	Provinsi Jawa Timur	8.652.573.847.000	460.253.429.000
	14	Provinsi Kalimantan Barat	1.077.260.646.000	34.388.325.000
	15	Provinsi Kalimantan Tengah	861.897.763.000	598.621.812.000
	16	Provinsi Kalimantan Selatan	1.378.310.161.000	330.772.803.000
	17	Provinsi Kalimantan Timur	2.336.400.729.000	105.815.964.000
	18	Provinsi Sulawesi Utara	613.078.297.000	39.047.540.000
	19	Provinsi Sulawesi Tengah	457.503.218.000	165.609.606.000
	20	Provinsi Sulawesi Selatan	1.885.551.871.000	55.830.081.000
	21	Provinsi Sulawesi Tenggara	532.339.697.000	97.744.385.000
	22	Provinsi Bali	1.947.045.143.000	63.794.506.000
	23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	766.253.542.000	80.591.397.000
	24	Provinsi Nusa Tenggara	615.961.628.000	112.024.399.000

		Timur		
	25	Provinsi Maluku	220.483.785.000	167.991.249.000
	26	Provinsi Papua	497.313.653.000	58.549.147.000
	27	Provinsi Maluku Utara	187.376.765.000	111.670.165.000
	28	Provinsi Banten	3.201.159.926.000	162.755.962.000
	29	Provinsi Bangka Belitung	293.537.847.000	119.728.880.000
	30	Provinsi Gorontalo	171.687.386.000	69.589.498.000
	31	Provinsi Kepulauan Riau	589.981.160.000	112.974.497.000
	32	Provinsi Papua Barat	322.619.924.000	192.029.356.000
	33	Provinsi Sulawesi Barat	147.029.007.000	35.415.545.000
	34	Provinsi Kalimantan Utara	211.435.795.000	82.126.368.000
Tahun	No	Nama Provinsi	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal
2019 SEMESTER II	1	Provinsi Aceh	2.698.912.471.000	3.162.088.165.000
	2	Provinsi Sumatera Utara	5.761.270.412.000	1.249.600.483.000
	3	Provinsi Sumatera Barat	2.328.432.873.000	1.062.230.453.000
	4	Provinsi Riau	3.558.210.585.000	1.161.037.468.000
	5	Provinsi Jambi	1.651.089.944.000	866.500.805.000
	6	Provinsi Sumatera Selatan	3.494.510.853.000	1.606.219.507.000
	7	Provinsi Bengkulu	826.674.936.000	741.823.063.000
	8	Provinsi Lampung	3.018.067.291.000	1.014.037.524.000
	9	Provinsi DKI Jakarta	45.707.400.003.000	11.551.927.779.000
	10	Provinsi Jawa Barat	21.244.266.598.000	2.530.347.542.000
	11	Provinsi Jawa Tengah	14.437.914.236.000	2.099.719.124.000
	12	Provinsi DI Yogyakarta	2.082.795.334.000	1.035.203.185.000
	13	Provinsi Jawa Timur	19.327.125.485.000	2.770.973.973.000
	14	Provinsi Kalimantan Barat	2.301.306.937.000	871.609.747.000
	15	Provinsi Kalimantan Tengah	1.776.231.952.000	1.293.574.792.000
	16	Provinsi Kalimantan Selatan	3.498.836.748.000	1.495.677.794.000
	17	Provinsi Kalimantan Timur	6.555.852.805.000	1.207.815.521.000
	18	Provinsi Sulawesi Utara	1.286.069.364.000	898.366.937.000
	19	Provinsi Sulawesi Tengah	1.090.854.785.000	836.619.827.000
	20	Provinsi Sulawesi Selatan	4.138.631.215.000	969.490.768.000
	21	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.128.441.587.000	1.194.738.481.000
	22	Provinsi Bali	4.023.156.314.000	556.754.502.000

	23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.807.482.745.000	669.705.153.000
	24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.258.958.953.000	798.224.255.000
	25	Provinsi Maluku	482.805.590.000	543.819.807.000
	26	Provinsi Papua	2.027.638.465.000	2.236.551.423.000
	27	Provinsi Maluku Utara	433.448.363.000	671.267.235.000
	28	Provinsi Banten	7.022.309.916.000	1.379.319.818.000
	29	Provinsi Bangka Belitung	826.701.095.000	441.201.203.000
	30	Provinsi Gorontalo	433.427.781.000	280.120.727.000
	31	Provinsi Kepulauan Riau	1.311.704.305.000	633.107.634.000
	32	Provinsi Papua Barat	483.725.598.000	1.757.983.373.000
	33	Provinsi Sulawesi Barat	345.208.054.000	364.249.411.000
	34	Provinsi Kalimantan Utara	655.846.206.000	567.371.723.000
Tahun	No	Nama Provinsi	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal
2020 SEMESTER I	1	Provinsi Aceh	1.129.695.493.000	184.986.965.000
	2	Provinsi Sumatera Utara	2.645.000.547.000	263.112.200.000
	3	Provinsi Sumatera Barat	1.111.125.691.000	113.894.872.000
	4	Provinsi Riau	1.684.291.896.000	85.461.014.000
	5	Provinsi Jambi	738.274.362.000	79.696.902.000
	6	Provinsi Sumatera Selatan	1.252.166.002.000	35.982.882.000
	7	Provinsi Bengkulu	362.652.348.000	83.357.302.000
	8	Provinsi Lampung	1.309.241.837.000	31.491.715.000
	9	Provinsi DKI Jakarta	14.057.580.617.000	383.006.503.000
	10	Provinsi Jawa Barat	8.926.442.780.000	183.688.799.000
	11	Provinsi Jawa Tengah	5.935.340.996.000	286.753.953.000
	12	Provinsi DI Yogyakarta	955.014.040.000	152.403.933.000
	13	Provinsi Jawa Timur	8.679.639.216.000	185.327.222.000
	14	Provinsi Kalimantan Barat	1.065.309.067.000	69.148.725.000
	15	Provinsi Kalimantan Tengah	812.904.554.000	340.386.845.000
	16	Provinsi Kalimantan Selatan	320.069.815.000	183.047.959.000
	17	Provinsi Kalimantan Timur	2.454.617.457.000	166.538.826.000
	18	Provinsi Sulawesi Utara	562.210.618.000	80.789.392.000
	19	Provinsi Sulawesi Tengah	449.017.689.000	123.358.678.000
	20	Provinsi Sulawesi Selatan	1.799.440.836.000	202.021.137.000

	21	Provinsi Sulawesi Tenggara	484.134.739.000	159.295.759.000
	22	Provinsi Bali	1.665.190.684.000	171.758.188.000
	23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	751.922.851.000	44.469.272.000
	24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.422.489.615.000	256.026.996.000
	25	Provinsi Maluku	239.488.380.000	44.084.683.000
	26	Provinsi Papua	973.757.515.000	56.101.909.000
	27	Provinsi Maluku Utara	53.076.596.000	113.833.717.000
	28	Provinsi Banten	2.873.783.059.000	24.423.621.000
	29	Provinsi Bangka Belitung	320.231.547.000	83.973.691.000
	30	Provinsi Gorontalo	178.658.246.000	70.817.336.000
	31	Provinsi Kepulauan Riau	589.312.833.000	148.144.908.000
	32	Provinsi Papua Barat	213.126.122.000	46.836.646.000
	33	Provinsi Sulawesi Barat	146.055.324.000	46.693.201.000
	34	Provinsi Kalimantan Utara	357.826.743.000	179.747.666.000
Tahun	No	Nama Provinsi	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal
2020 SEMESTER II	1	Provinsi Aceh	2.184.607.197.000	2.067.388.451.000
	2	Provinsi Sumatera Utara	5.967.650.672.000	2.365.811.530.000
	3	Provinsi Sumatera Barat	2.528.472.798.000	1.177.547.062.000
	4	Provinsi Riau	3.125.306.696.000	1.015.284.458.000
	5	Provinsi Jambi	1.665.325.703.000	1.056.496.115.000
	6	Provinsi Sumatera Selatan	4.043.002.594.000	2.222.333.311.000
	7	Provinsi Bengkulu	1.116.839.955.000	611.423.893.000
	8	Provinsi Lampung	2.699.882.477.000	633.538.178.000
	9	Provinsi DKI Jakarta	57.561.162.309.000	18.041.247.738.000
	10	Provinsi Jawa Barat	25.223.220.670.000	4.683.900.311.000
	11	Provinsi Jawa Tengah	15.993.530.006.000	3.008.006.040.000
	12	Provinsi DI Yogyakarta	2.163.742.926.000	1.090.561.434.000
	13	Provinsi Jawa Timur	18.428.947.951.000	2.755.811.839.000
	14	Provinsi Kalimantan Barat	2.686.932.368.000	1.251.665.209.000
	15	Provinsi Kalimantan Tengah	1.456.627.192.000	1.103.243.081.000
	16	Provinsi Kalimantan Selatan	3.824.033.840.000	1.333.054.160.000
	17	Provinsi Kalimantan Timur	4.116.573.389.000	998.337.401.000

18	Provinsi Sulawesi Utara	1.306.462.695.000	1.013.768.478.000
19	Provinsi Sulawesi Tengah	1.041.466.603.000	765.940.347.000
20	Provinsi Sulawesi Selatan	3.394.235.002.000	1.001.199.030.000
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.224.218.532.000	2.320.831.478.000
22	Provinsi Bali	3.762.474.904.000	864.631.522.000
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.679.004.945.000	513.875.960.000
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.588.859.230.000	1.574.381.077.000
25	Provinsi Maluku	526.647.678.000	680.899.776.000
26	Provinsi Papua	1.185.019.353.000	1.145.341.021.000
27	Provinsi Maluku Utara	514.915.311.000	1.197.799.329.000
28	Provinsi Banten	8.154.745.690.000	2.028.760.692.000
29	Provinsi Bangka Belitung	963.634.369.000	313.643.999.000
30	Provinsi Gorontalo	282.775.450.000	176.050.145.000
31	Provinsi Kepulauan Riau	1.303.321.350.000	710.748.283.000
32	Provinsi Papua Barat	517.290.121.000	2.184.125.505.000
33	Provinsi Sulawesi Barat	275.567.138.000	267.304.861.000
34	Provinsi Kalimantan Utara	690.260.963.000	524.242.878.000

Sumber: <https://www.bps.go.id/>

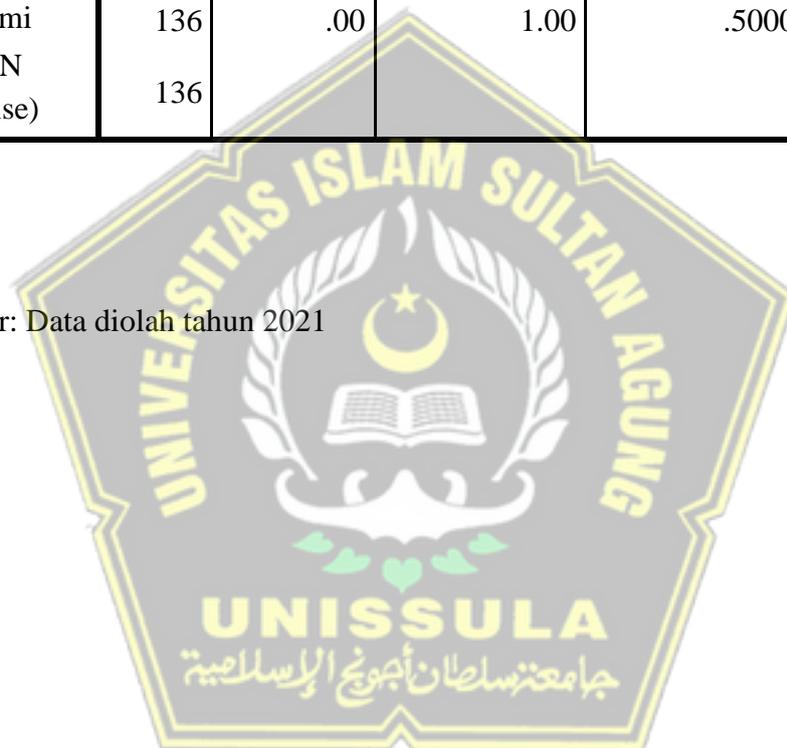


Lampiran 2 Tabel Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	136	53076596 000	57561162309 000	363020962413 9.71	74025150351 00.261
BM	136	24423621 000	18041247738 000	918271177882 .35	19242427264 37.092
Pandemi	136	.00	1.00	.5000	.50185
Valid N (listwise)	136				

Sumber: Data diolah tahun 2021



Lampiran 3 Tabel Uji Multikolinearitas dengan Nilai Tolerance dan VIF

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	26203538 949.895	11665587 3231.931		.225	.823		
PAD	.229	.011	.882	21.673	.000	1.000	1.000
Pandemi	11917281 0943.946	15607493 3420.254	.031	.764	.446	1.000	1.000

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data diolah Tahun 2021



Lampiran 4 Tabel Uji Autokorelasi

Model Summary^b

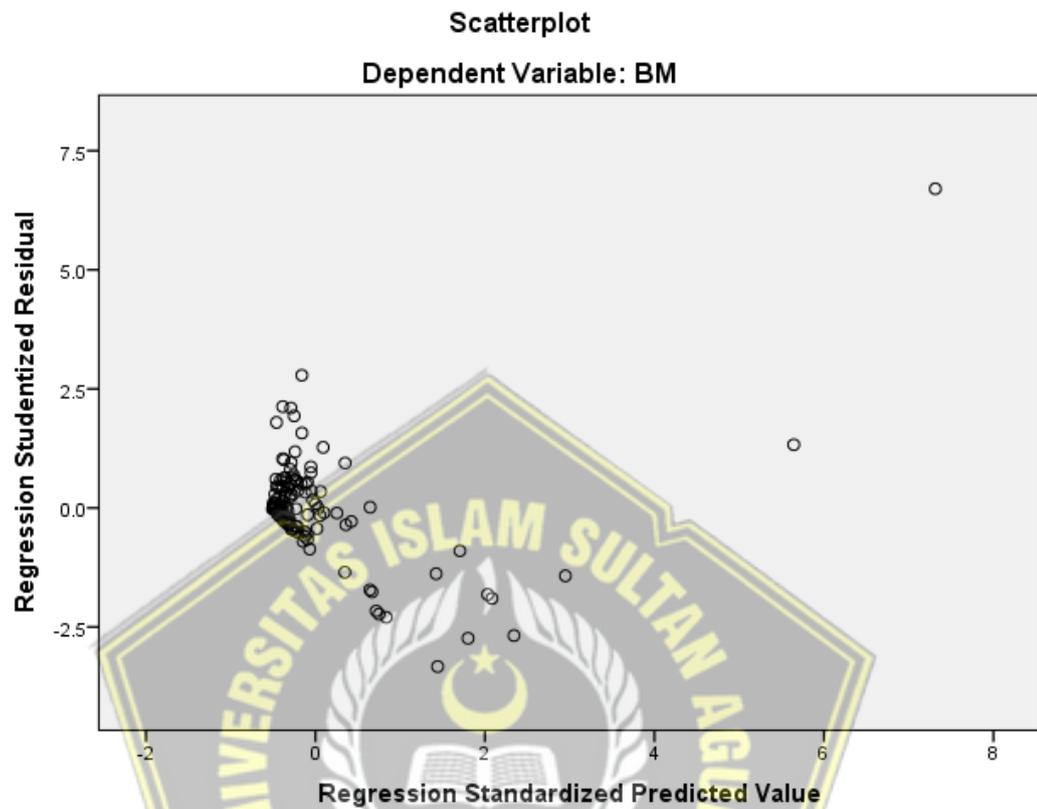
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.883 ^a	.780	.776	91003845069 0.627	1.612

a. Predictors: (Constant), Pandemi, PAD

b. Dependent Variable: BM

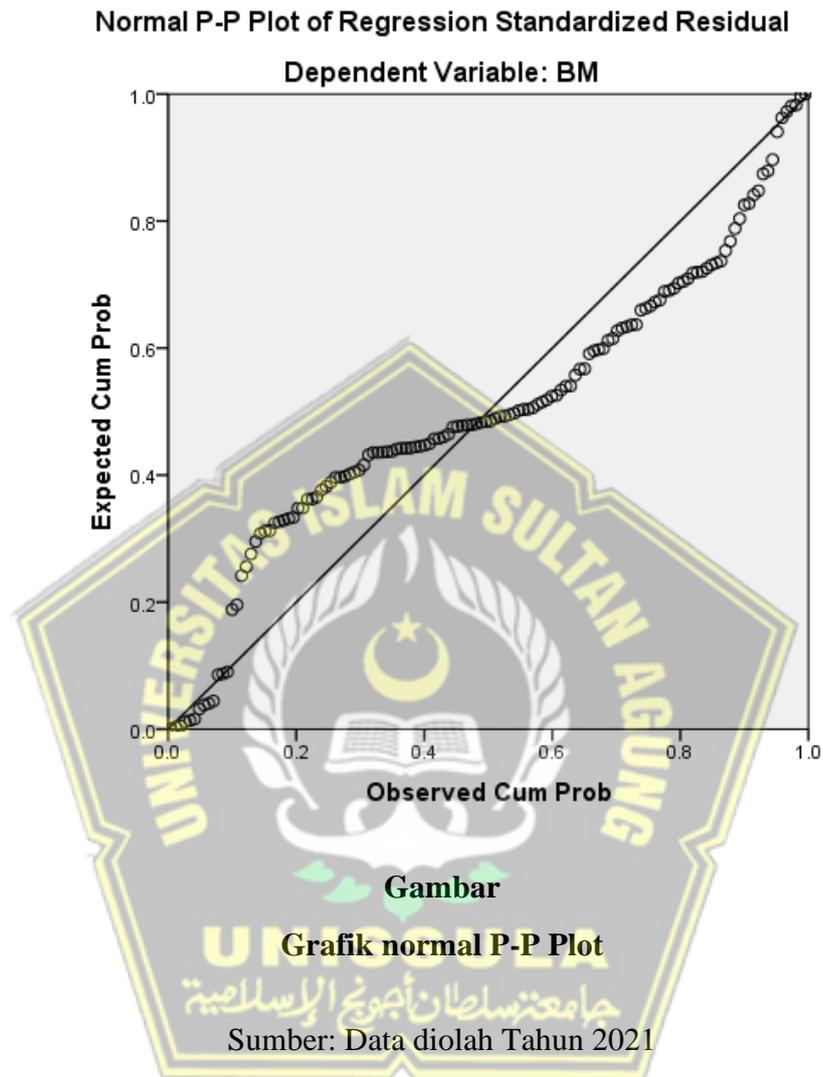
Sumber: Data diolah Tahun 2021



Lampiran 5 Gambar Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot

Gambar
Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot

Sumber: Data diolah Tahun 2021

Lampiran 6 Gambar Grafik normal P-P Plot

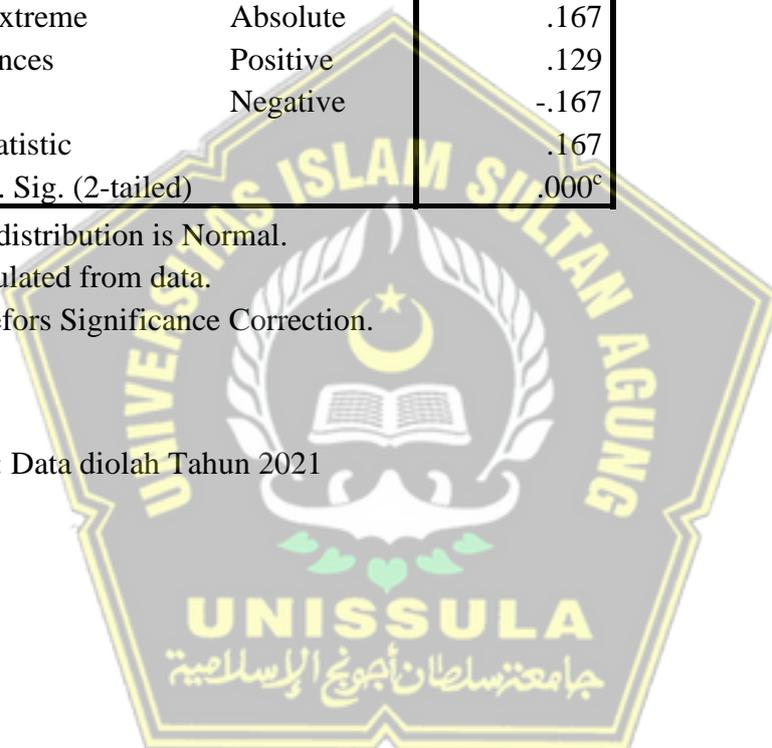
Lampiran 7 Tabel Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		136
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000880
	Std. Deviation	99.29210000
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.167
	Positive	.129
	Negative	-.167
Test Statistic		.167
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah Tahun 2021



Lampiran 8 Tabel Uji R²

Model Summary

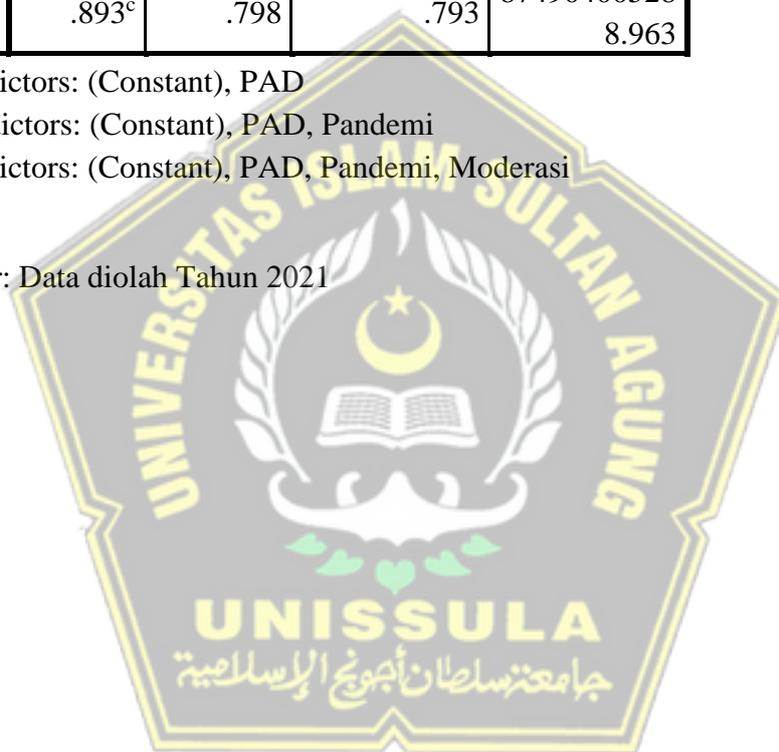
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.882 ^a	.779	.777	90862144369 4.078
2	.883 ^b	.780	.776	91003845069 0.627
3	.893 ^c	.798	.793	87490400528 8.963

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Predictors: (Constant), PAD, Pandemi

c. Predictors: (Constant), PAD, Pandemi, Moderasi

Sumber: Data diolah Tahun 2021



Lampiran 9 Tabel Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	38923640713	1	38923640713	471.463	.000 ^b
		91617600000 00000.000		91617600000 00000.000		
	Residual	11062945234 40552000000 00000.000	134	82559292794 07104000000 00.000		
		Total		49986585948 32170000000 00000.000	135	
2	Regression	38971925191	2	19485962595	235.289	.000 ^c
		24092000000 00000.000		62046000000 00000.000		
	Residual	11014660757 08077800000 00000.000	133	82816998173 53969000000 00.000		
		Total		49986585948 32170000000 00000.000	135	
3	Regression	39882553304	3	13294184434	173.676	.000 ^d
		50885400000 00000.000		83628600000 00000.000		
	Residual	10104032643 81284000000 00000.000	132	76545701847 06697000000 00.000		
		Total		49986585948 32170000000 00000.000	135	

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), PAD

c. Predictors: (Constant), PAD, Pandemi

d. Predictors: (Constant), PAD, Pandemi, Moderasi

Sumber: Data diolah Tahun 2021

Lampiran 10 Tabel Uji T dan Regresi Moderasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	85564113657	86840543350		.985	.326
		.123	.779			
	PAD	.229	.011	.882	21.713	.000
2	(Constant)	26203538949	11665587323		.225	.823
		.895	1.931			
	PAD	.229	.011	.882	21.673	.000
	Pandemi	11917281094	15607493342			
		3.946	0.253	.031	.764	.446
3	(Constant)	17367840096	12002604728		1.447	.150
		9.002	1.834			
	PAD	.188	.016	.723	11.974	.000
	Pandemi	-	16758997813			
		13828201120	0.791	-.036	-.825	.411
		0.865				
	Moderasi	.071	.021	.219	3.449	.001

a. Dependent Variable: BM

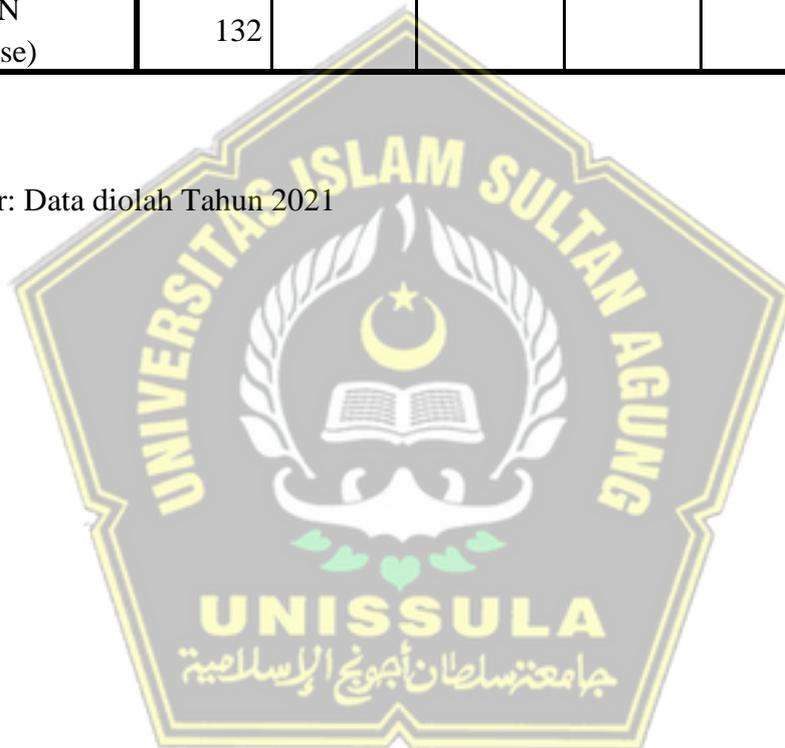
Sumber: Data diolah Tahun 2021

Lampiran 11 Tabel Statistik Deskriptif setelah Ln

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LnPAD2	132	21.91	45.79	33.0865	4.88699
LnBM2	132	19.88	36.52	27.9397	4.43871
PANDEMI	132	.00	1.00	.5000	.50190
Valid N (listwise)	132				

Sumber: Data diolah Tahun 2021



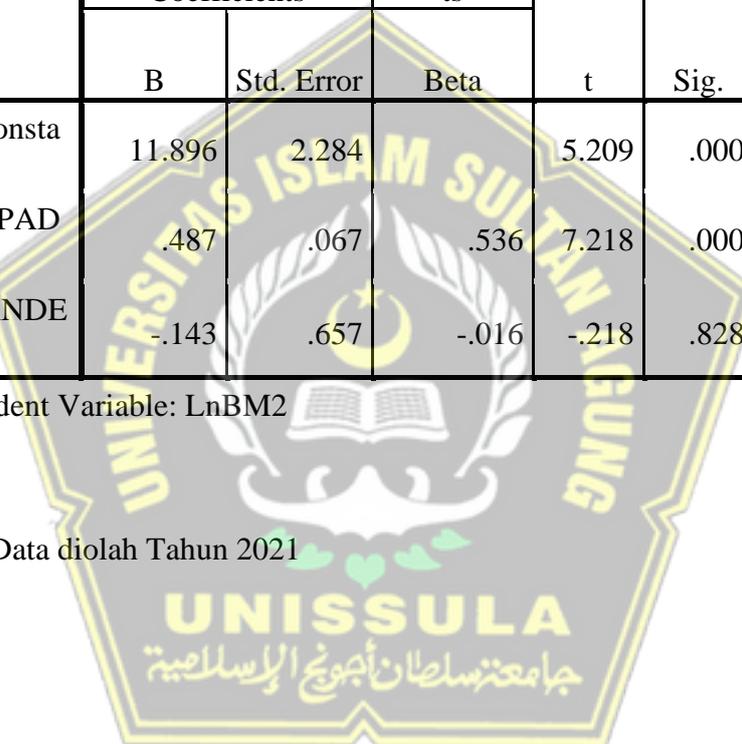
Lampiran 12 Tabel Uji Multikolinearitas dengan Nilai Tolerance dan VIF
setelan Ln

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	11.896	2.284		5.209	.000		
LnPAD	.487	.067	.536	7.218	.000	1.000	1.000
PANDEMI	-.143	.657	-.016	-.218	.828	1.000	1.000

a. Dependent Variable: LnBM2

Sumber: Data diolah Tahun 2021



Lampiran 13 Tabel Uji Autokorela Setelah Ln

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.537 ^a	.288	.277	3.77433	.809

a. Predictors: (Constant), PANDEMI, LnPAD2

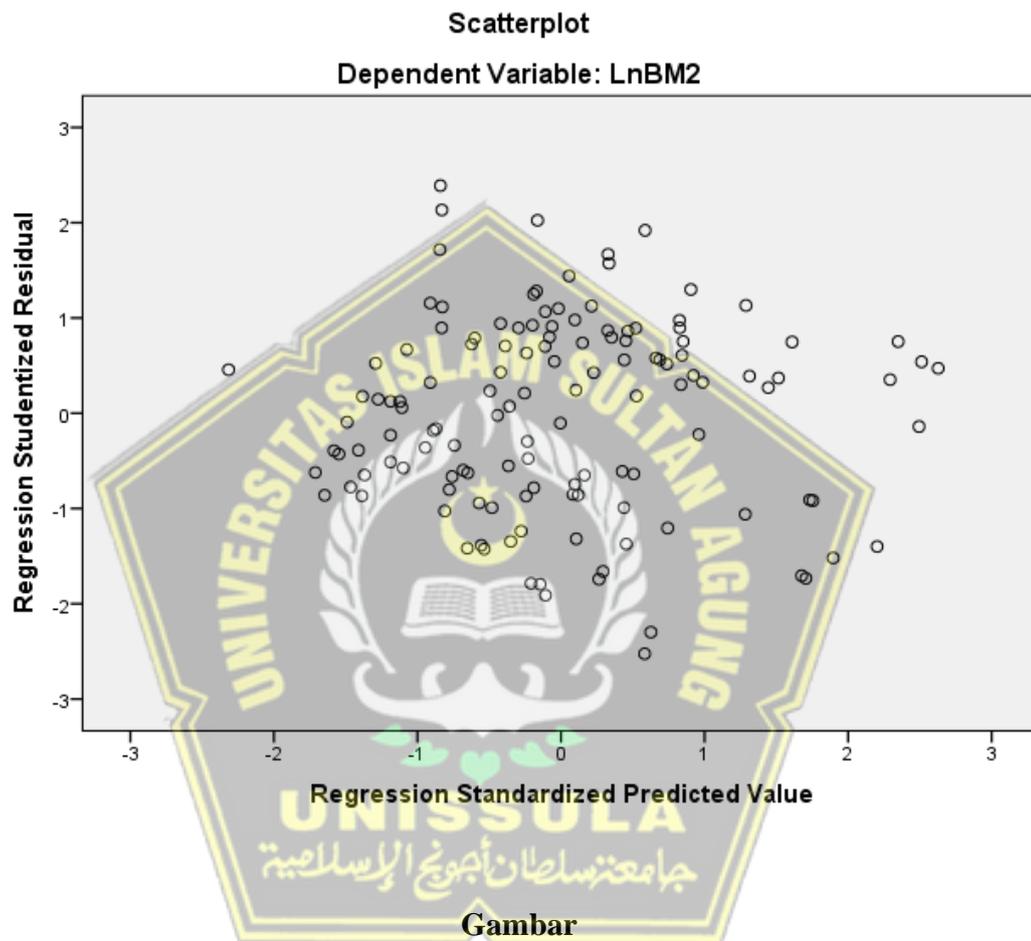
b. Dependent Variable: LnBM2

Sumber: Data diolah Tahun 2021

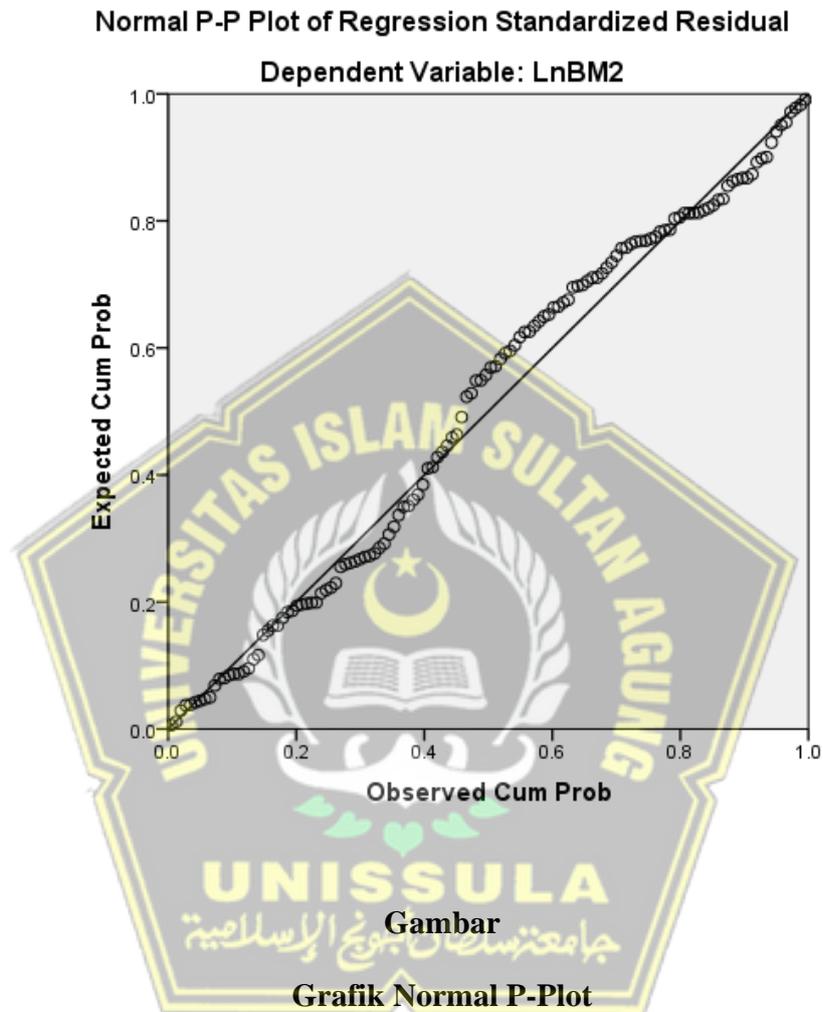


Lampiran 14 Gambar Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot

Setelah Ln

**Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot**

Sumber: Data diolah Tahun 2021

Lampiran 15 Gambar Grafik normal P-P Plot Setelah Ln

Sumber: Data diolah Tahun 2021

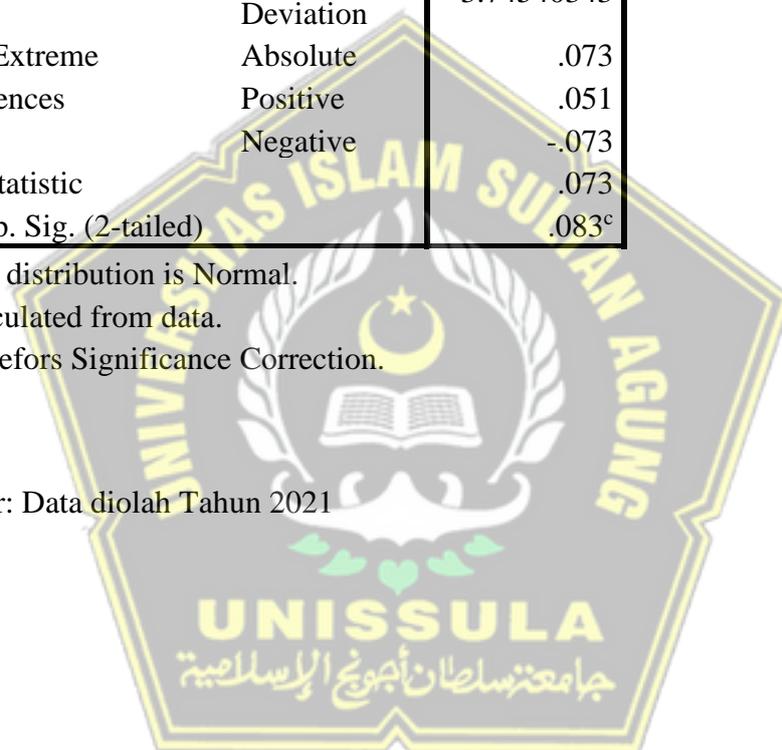
Lampiran 16 Tabel Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) Setelah Ln

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		132
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.74540343
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.073
	Positive	.051
	Negative	-.073
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.083 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah Tahun 2021



Lampiran 17 Tabel Uji R² Setelah Ln

Model Summary

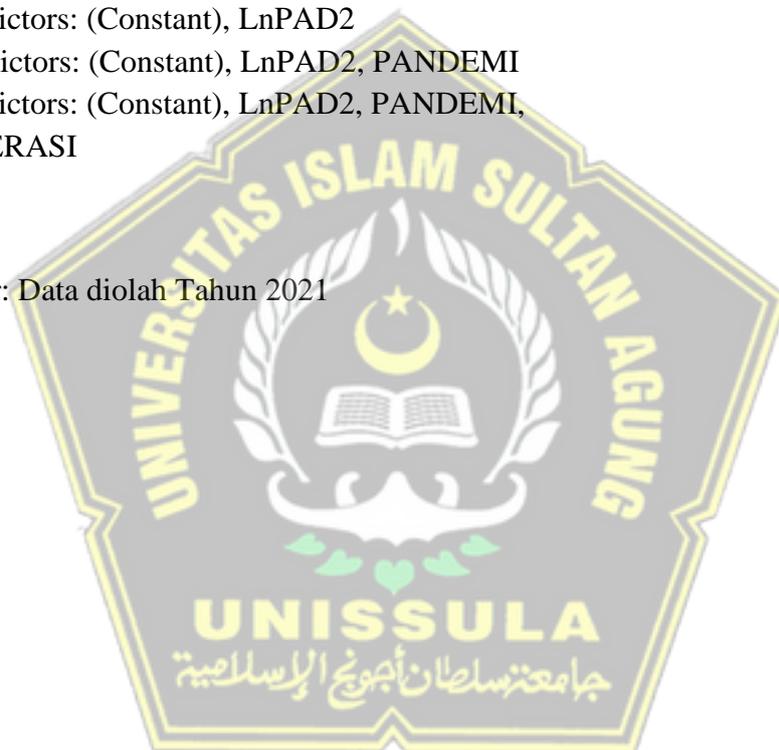
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.536 ^a	.288	.282	3.76048
2	.537 ^b	.288	.277	3.77433
3	.537 ^c	.288	.271	3.78886

a. Predictors: (Constant), LnPAD2

b. Predictors: (Constant), LnPAD2, PANDEMI

c. Predictors: (Constant), LnPAD2, PANDEMI, MODERASI

Sumber: Data diolah Tahun 2021



Lampiran 18 Tabel Uji F Setelah Ln

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	742.634	1	742.634	52.516	.000 ^b
	Residual	1838.353	130	14.141		
	Total	2580.987	131			
2	Regression	743.313	2	371.656	26.089	.000 ^c
	Residual	1837.674	129	14.246		
	Total	2580.987	131			
3	Regression	743.487	3	247.829	17.264	.000 ^d
	Residual	1837.500	128	14.355		
	Total	2580.987	131			

a. Dependent Variable: LnBM2

b. Predictors: (Constant), LnPAD2

c. Predictors: (Constant), LnPAD2, PANDEMI

d. Predictors: (Constant), LnPAD2, PANDEMI, MODERASI

Sumber: Data diolah Tahun 2021

Lampiran 19 Tabel Uji T dan Regresi Moderasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.820	2.248		5.257	.000
	LnPAD2	.487	.067	.536	7.247	.000
2	(Constant)	11.896	2.284		5.209	.000
	LnPAD2	.487	.067	.536	7.218	.000
	PANDEMI	-.143	.657	-.016	-.218	.828
3	(Constant)	11.652	3.193		3.649	.000
	LnPAD2	.494	.095	.544	5.187	.000
	PANDEMI	.351	4.531	.040	.077	.938
	MODERASI	-.015	.135	-.057	-.110	.912

a. Dependent Variable: LnBM2

Sumber: Data diolah Tahun 2021